



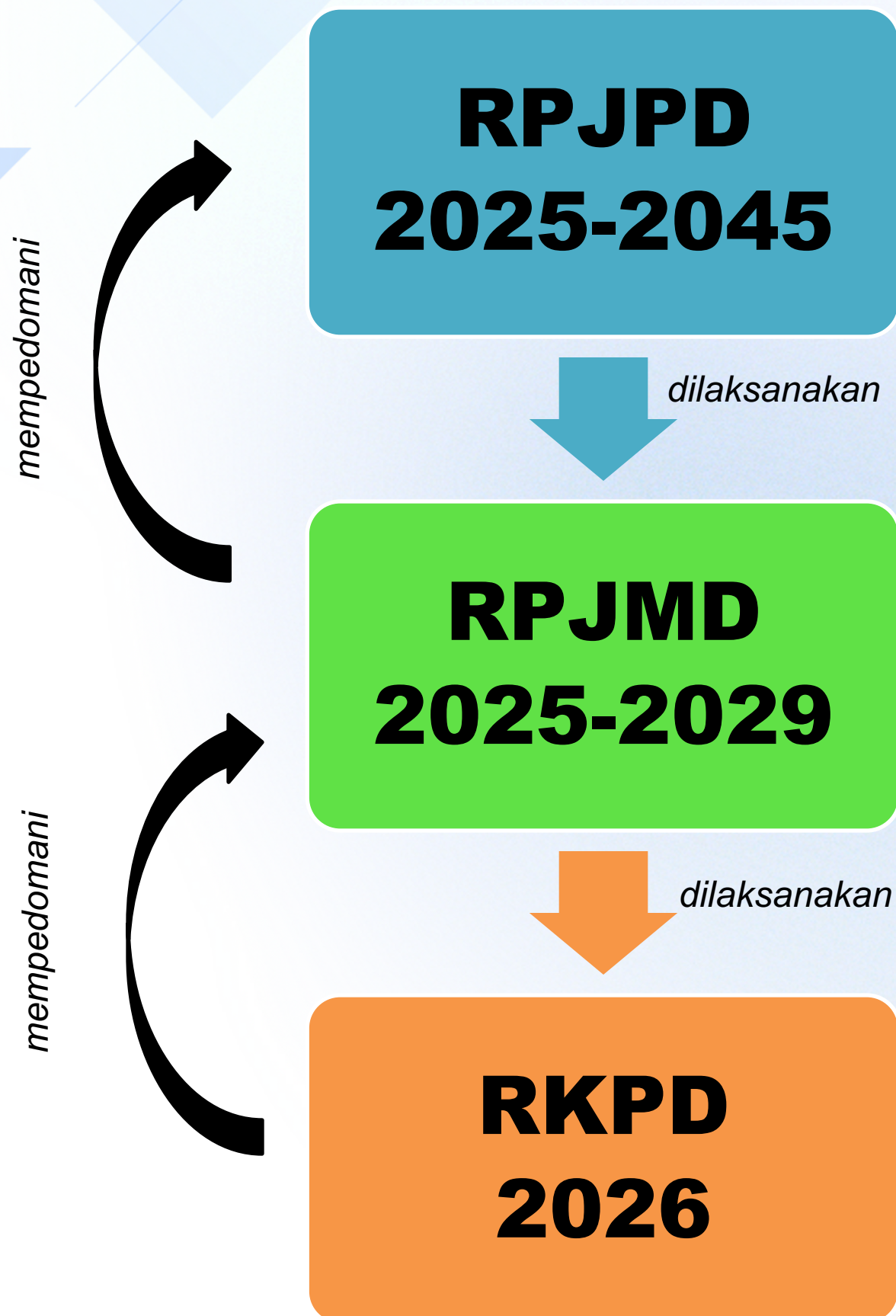
RANCANGAN AWAL RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2025-2029 DAN RKPD PROV. KALTIM TAHUN 2026

“KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS”

Yusliando (Kepala Bappeda Prov. Kaltim)

KONSULTASI PUBLIK – SAMARINDA, 25 MARET 2025

KEDUDUKAN STRATEGIS RPJMD 2025-2029 DAN RKPD 2026



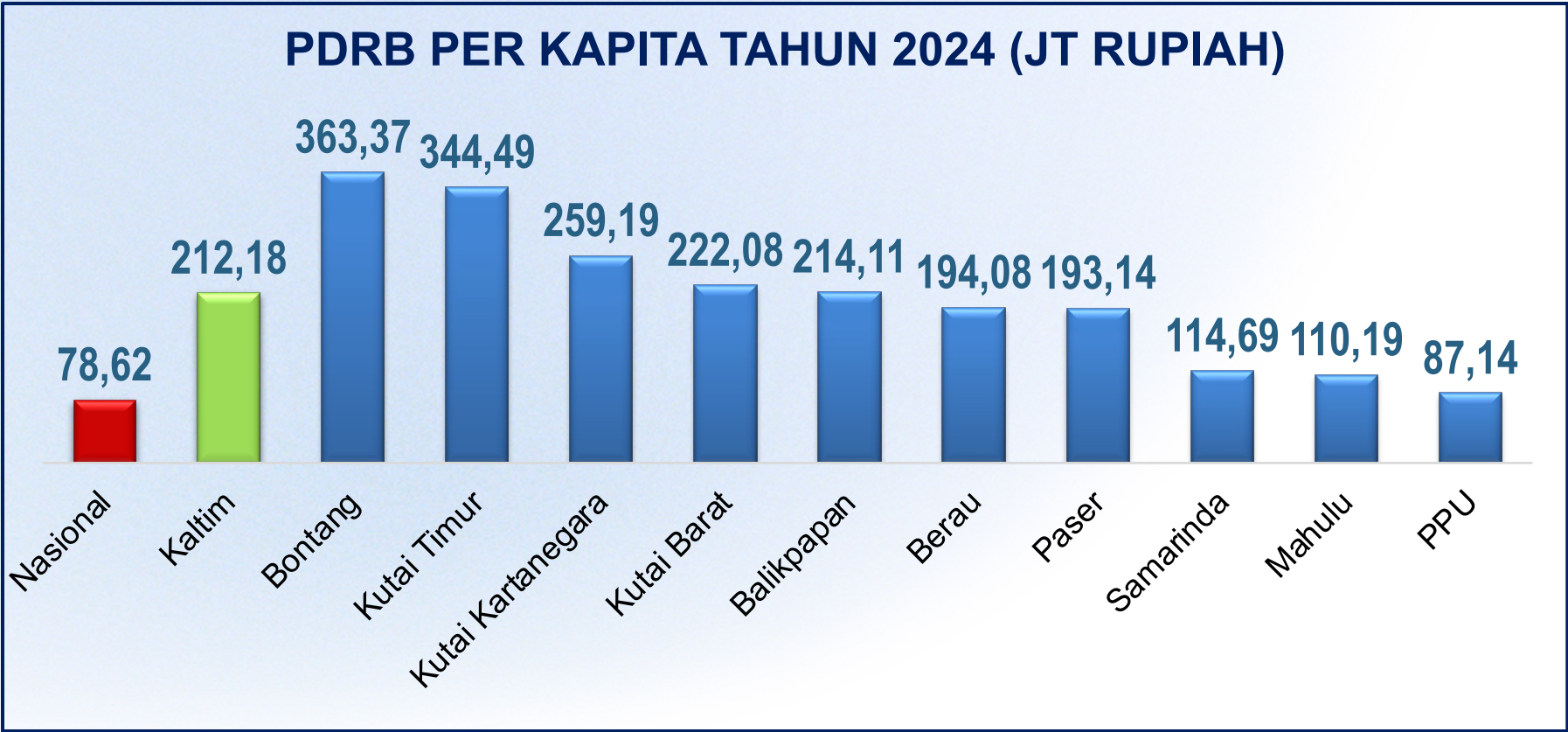
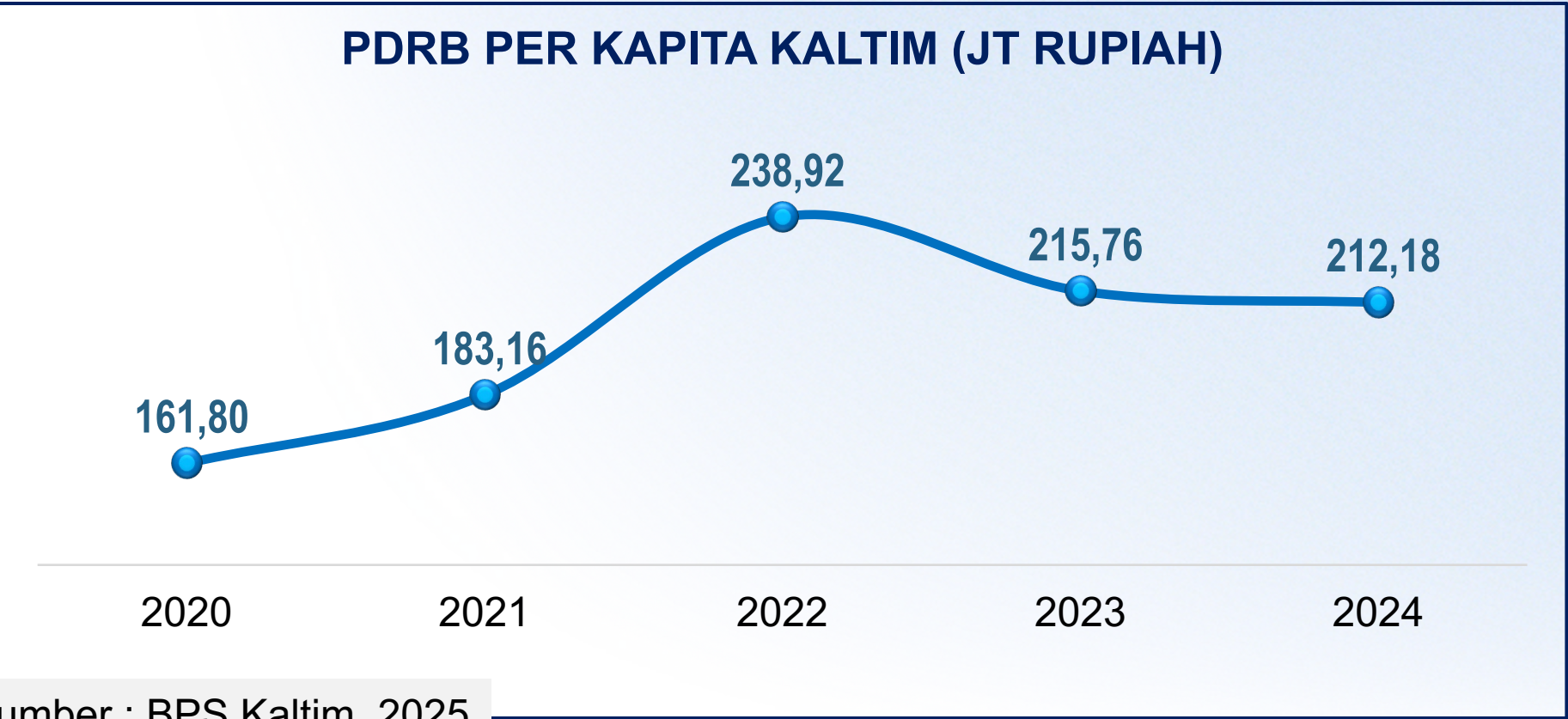
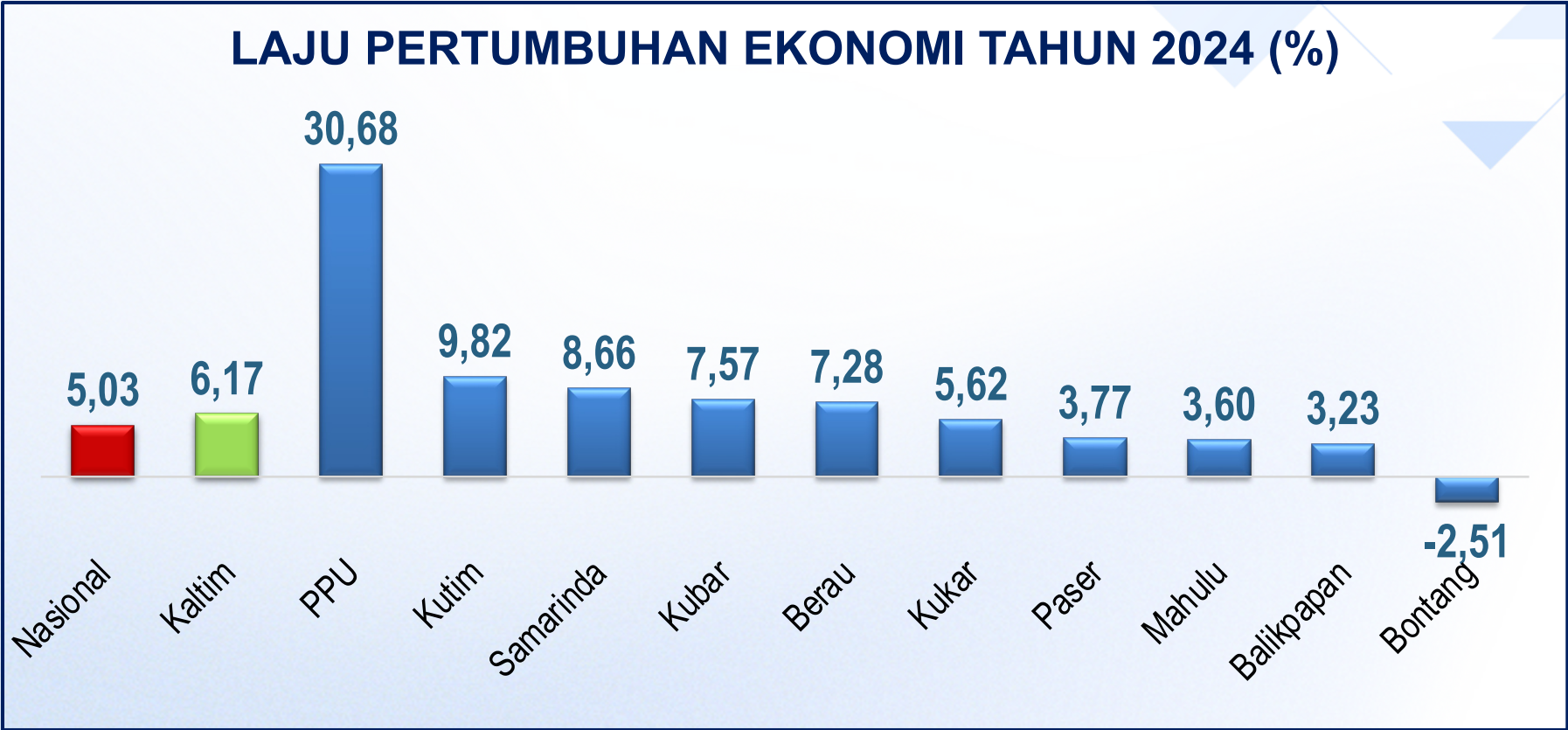
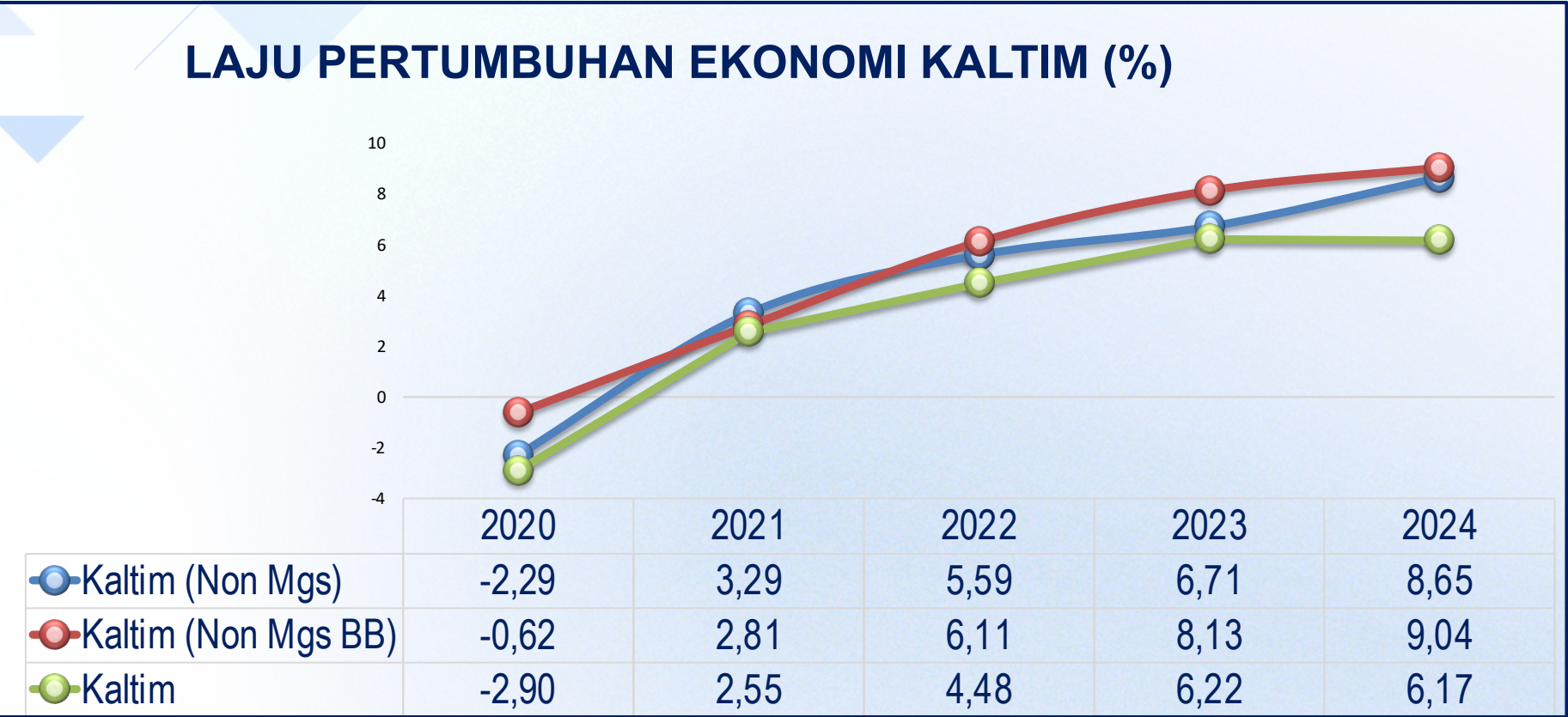
- Telah ditetapkan melalui Perda 11 Tahun 2024
- Visi Kaltim Sejahtera 2045; Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil, Berkelanjutan
- 3 Agenda Transformasi : Sosial, Ekonomi, Tata Kelola
- Pedoman penyusunan RPJMD hingga 2045

- Penjabaran Visi, Misi, Program Unggulan KDH 2025-2030
- Pelaksanaan Tahap 1 (Fondasi) RPJPD 2025-2045
- Diselaraskan dengan RPJM Nasional 2025-2029
- Pedoman penyusunan RKPD P-2025 s.d. 2030

- Tahun penuh pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2045
- Mengakomodir Visi, Misi, Program Unggulan KDH
- Selaras dengan RKP 2026

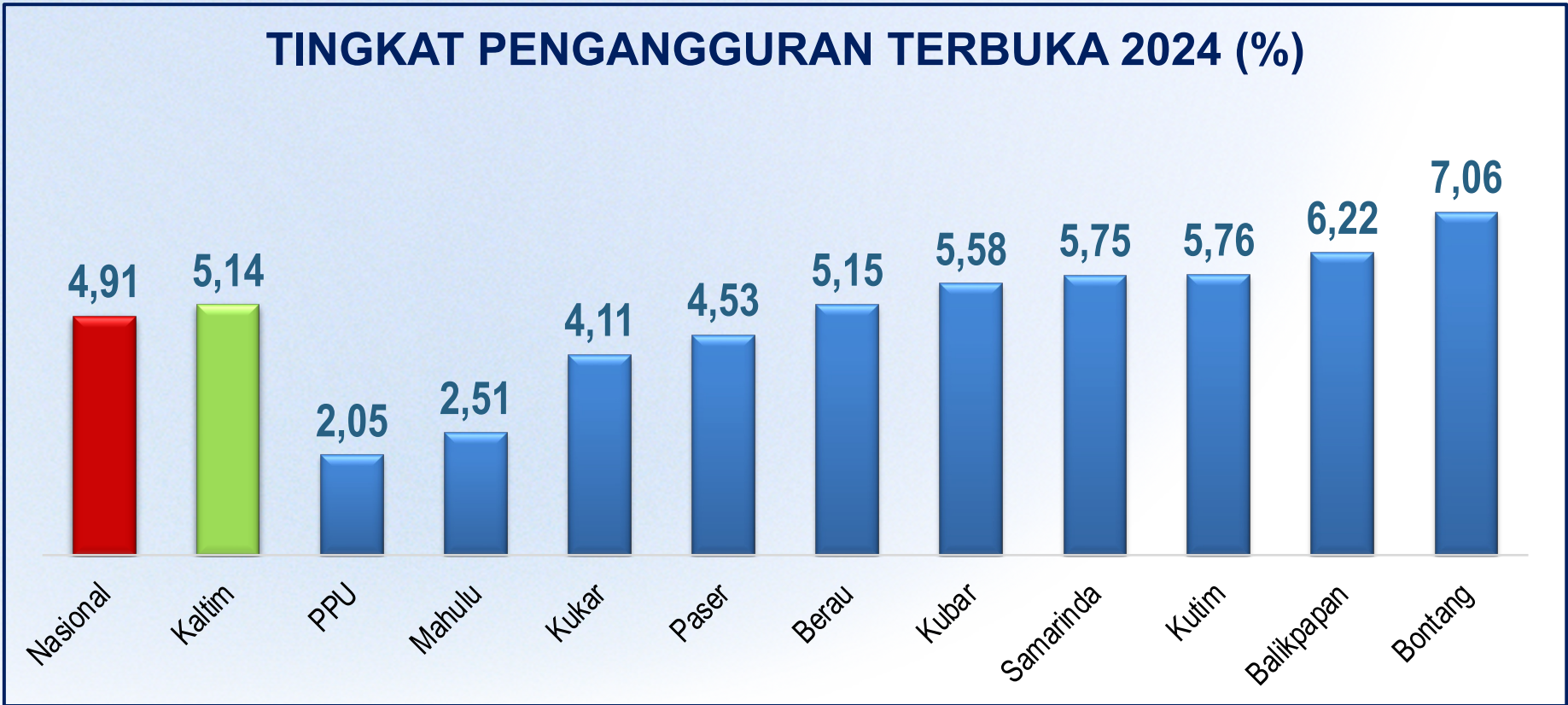
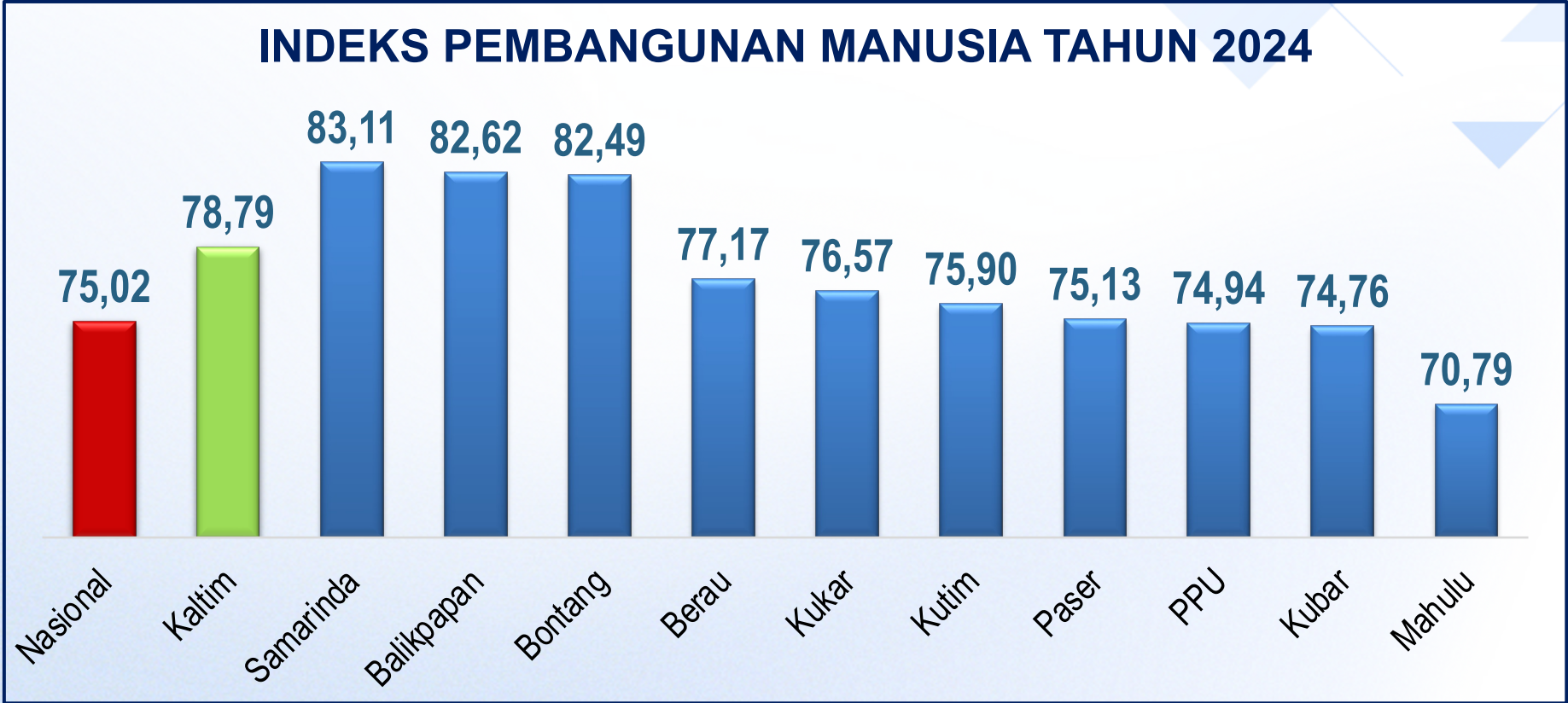
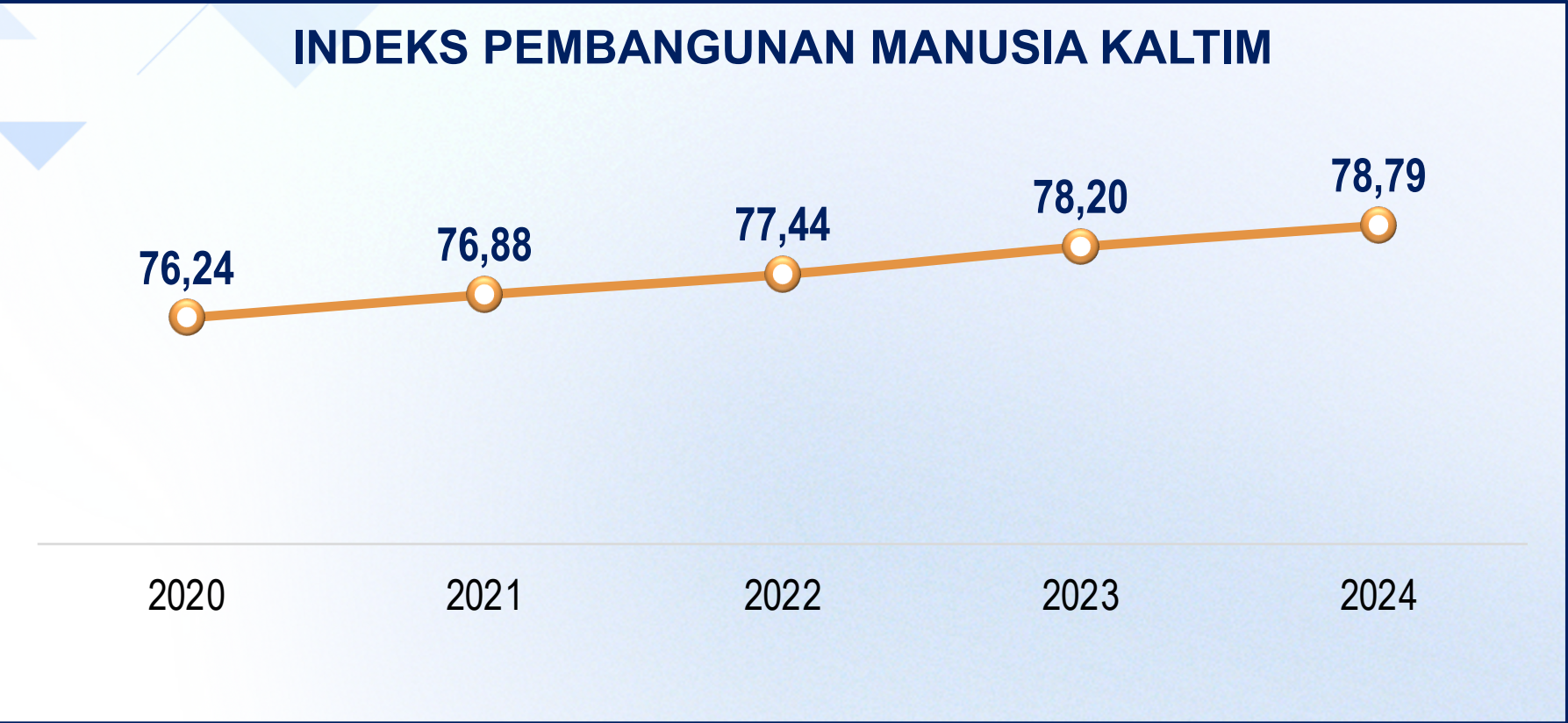
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (1)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat – Makro Ekonomi



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (2)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat – Makro Ekonomi



Sumber : BPS Kaltim, 2025

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (3)

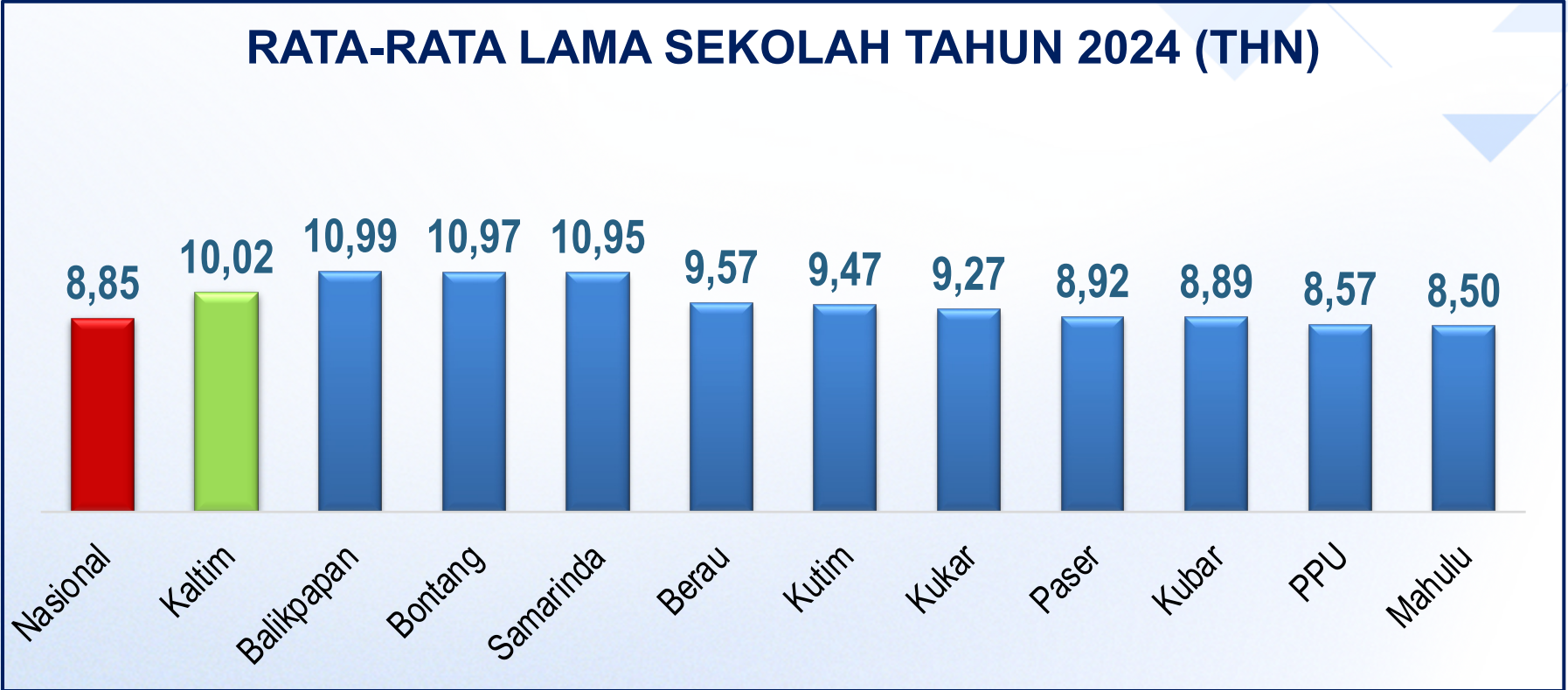
Aspek Kesejahteraan Masyarakat – Makro Ekonomi



Sumber : BPS Kaltim, 2025

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (4)

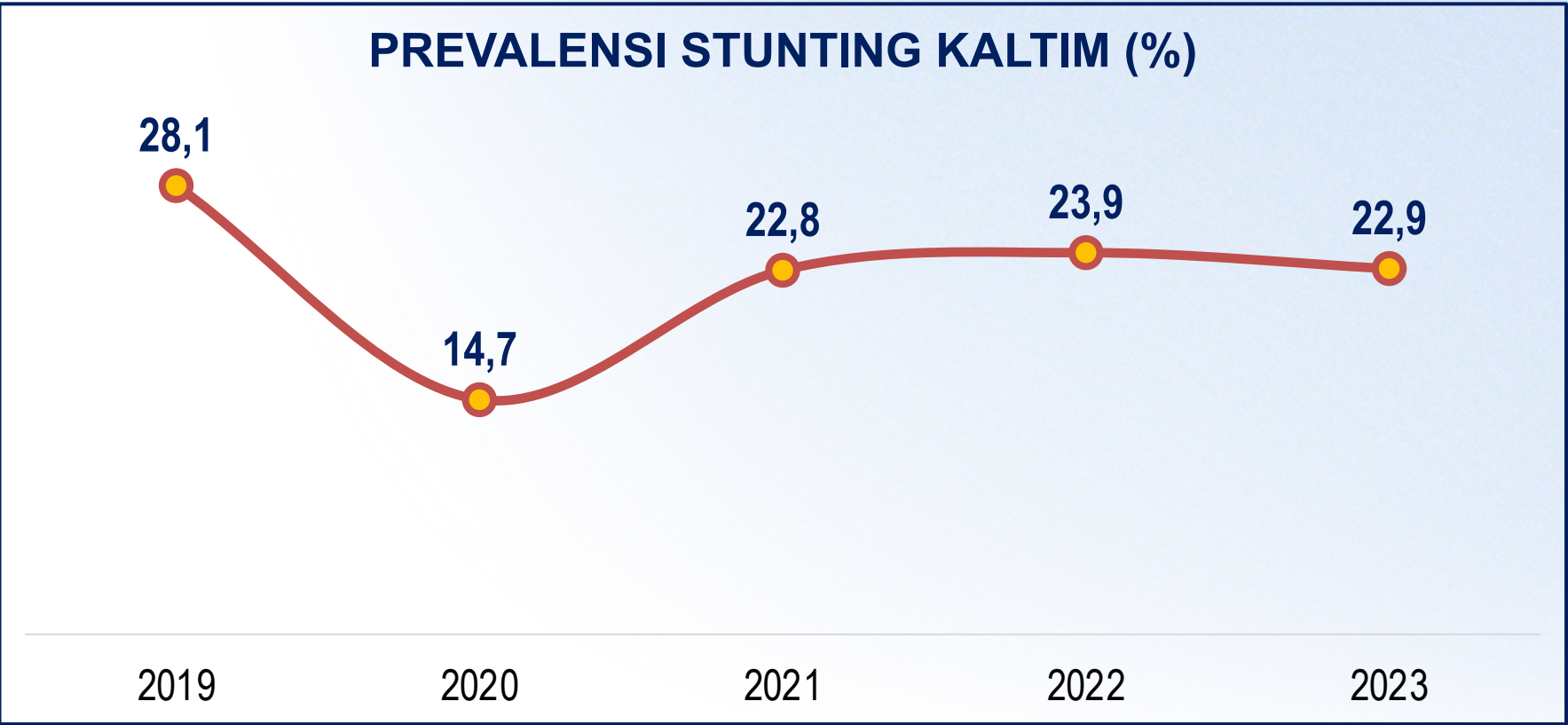
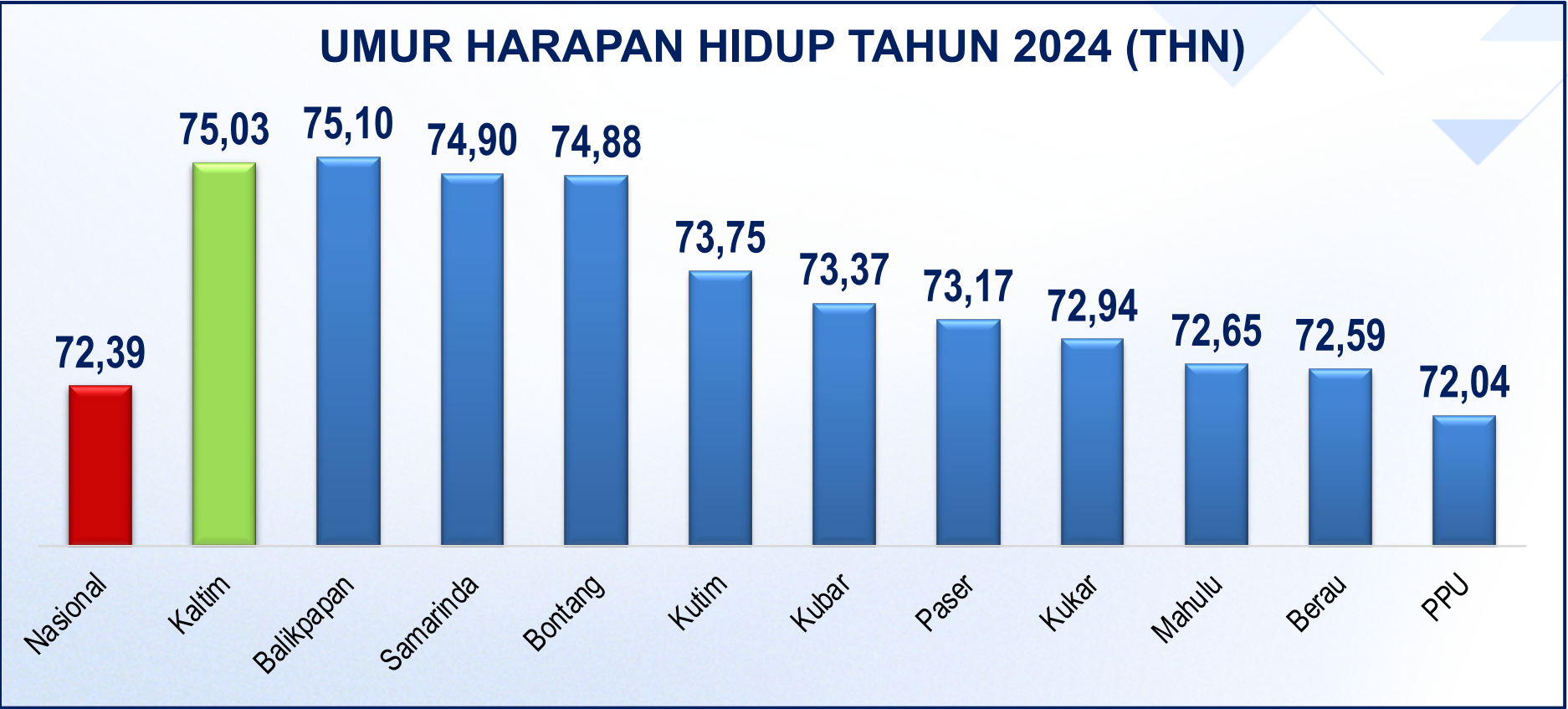
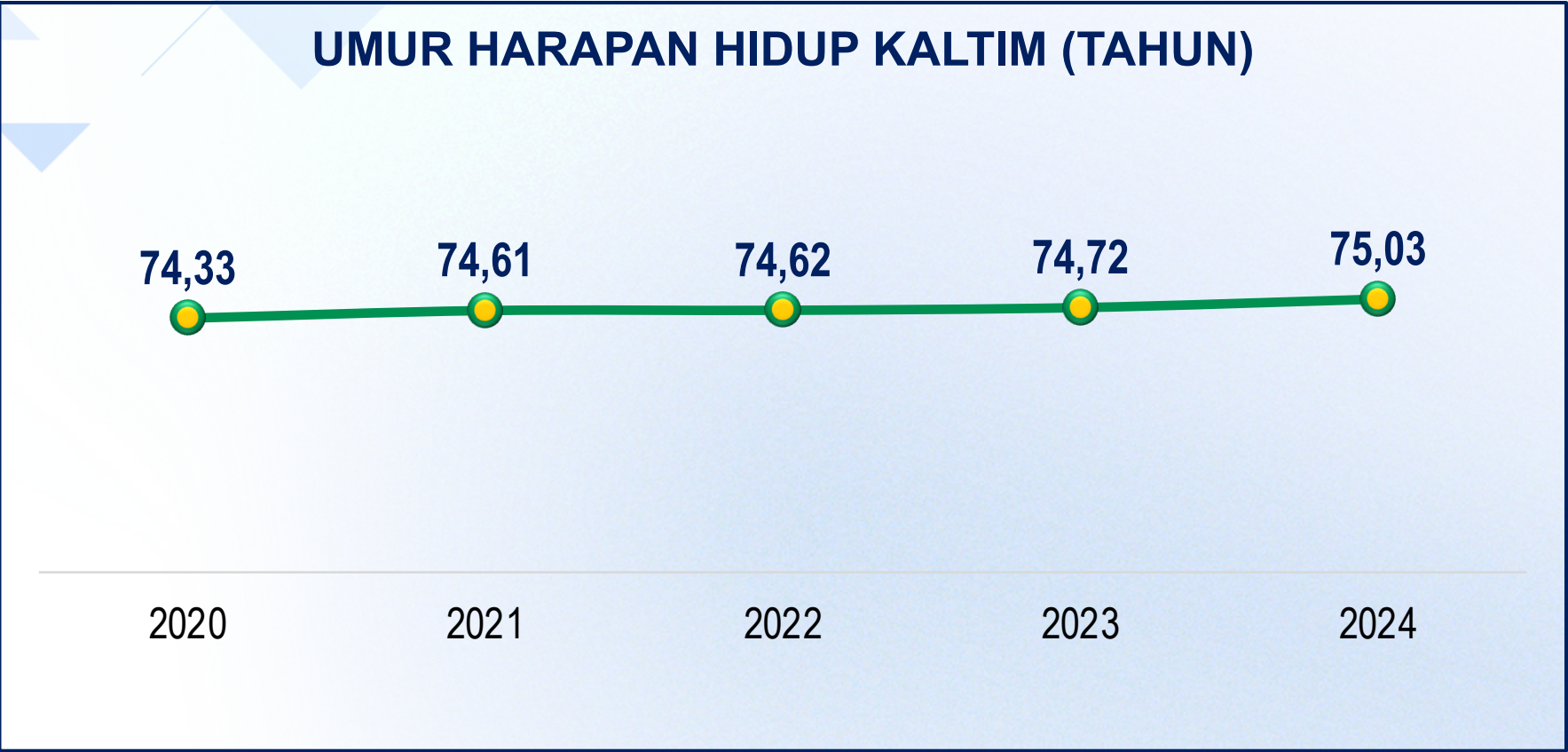
Aspek Kesejahteraan Masyarakat – Pendidikan



Sumber : BPS Kaltim, 2025

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (5)

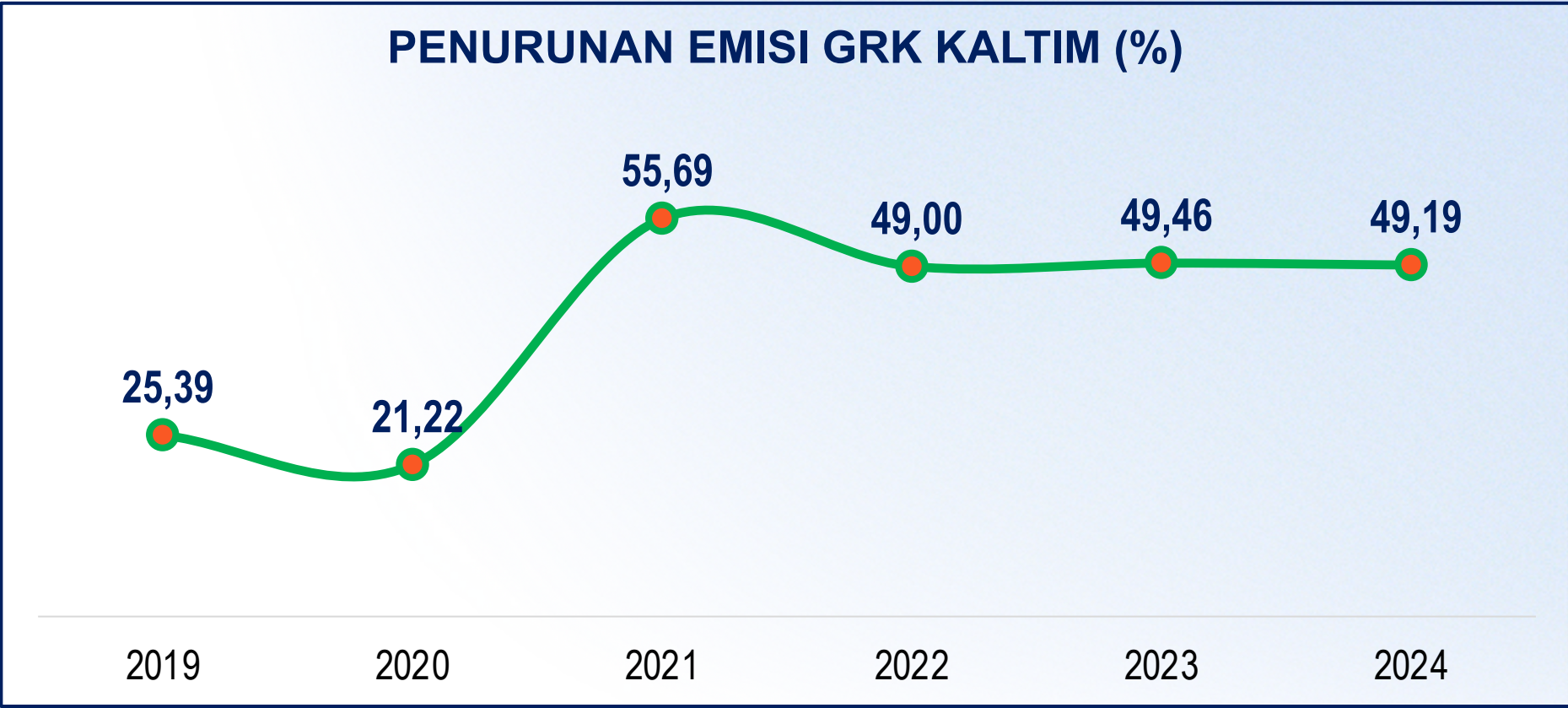
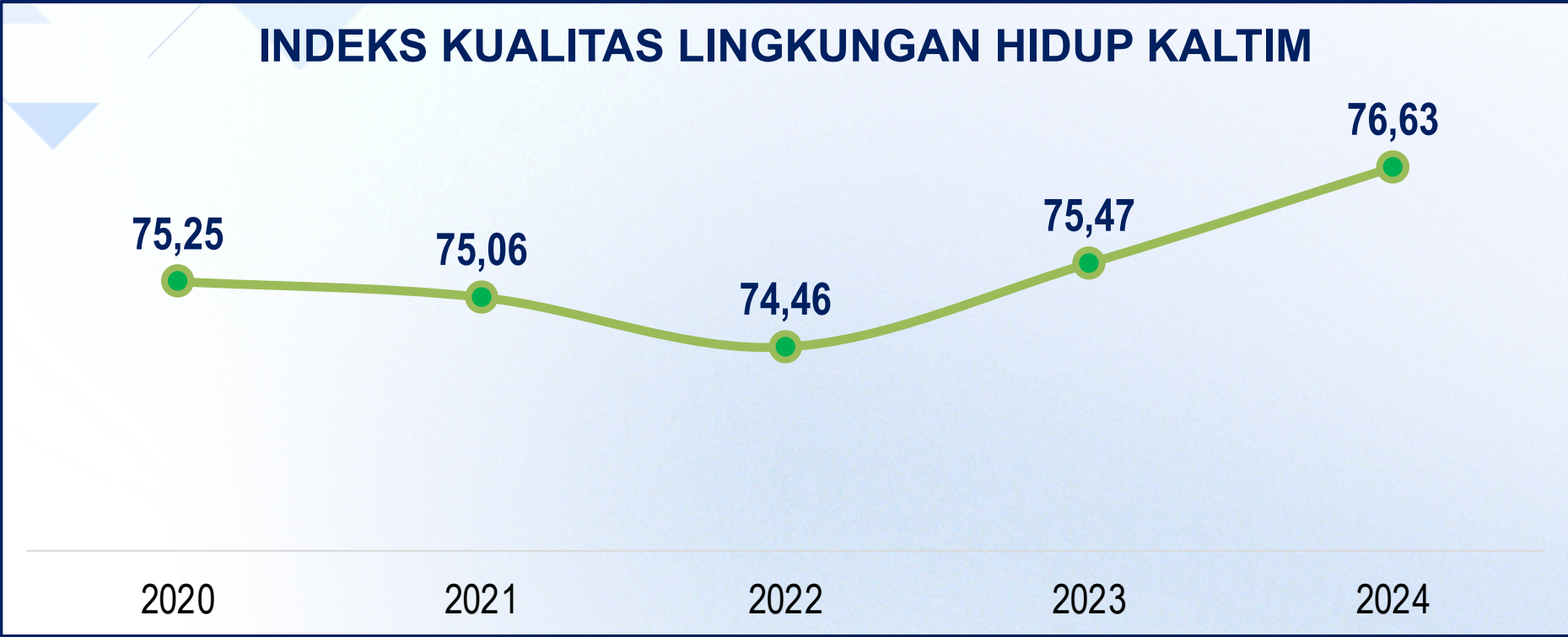
Aspek Kesejahteraan Masyarakat – Kesehatan



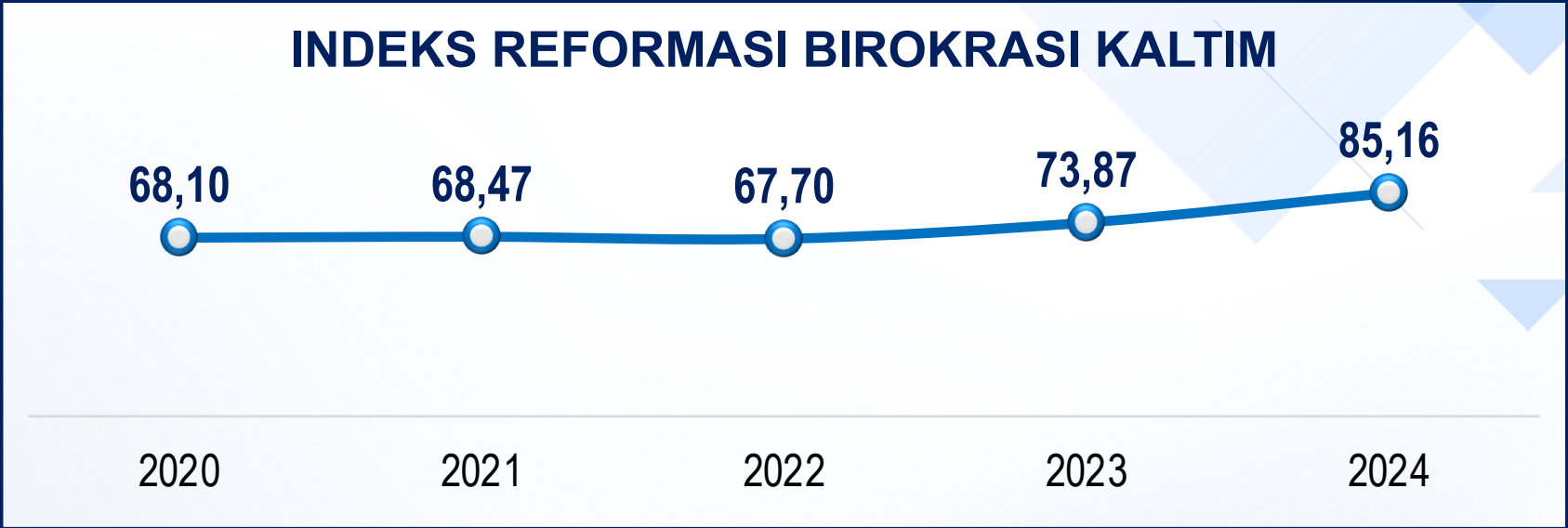
Sumber : BPS Kaltim, 2025 dan SSGI 2023

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (6)

Aspek Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan



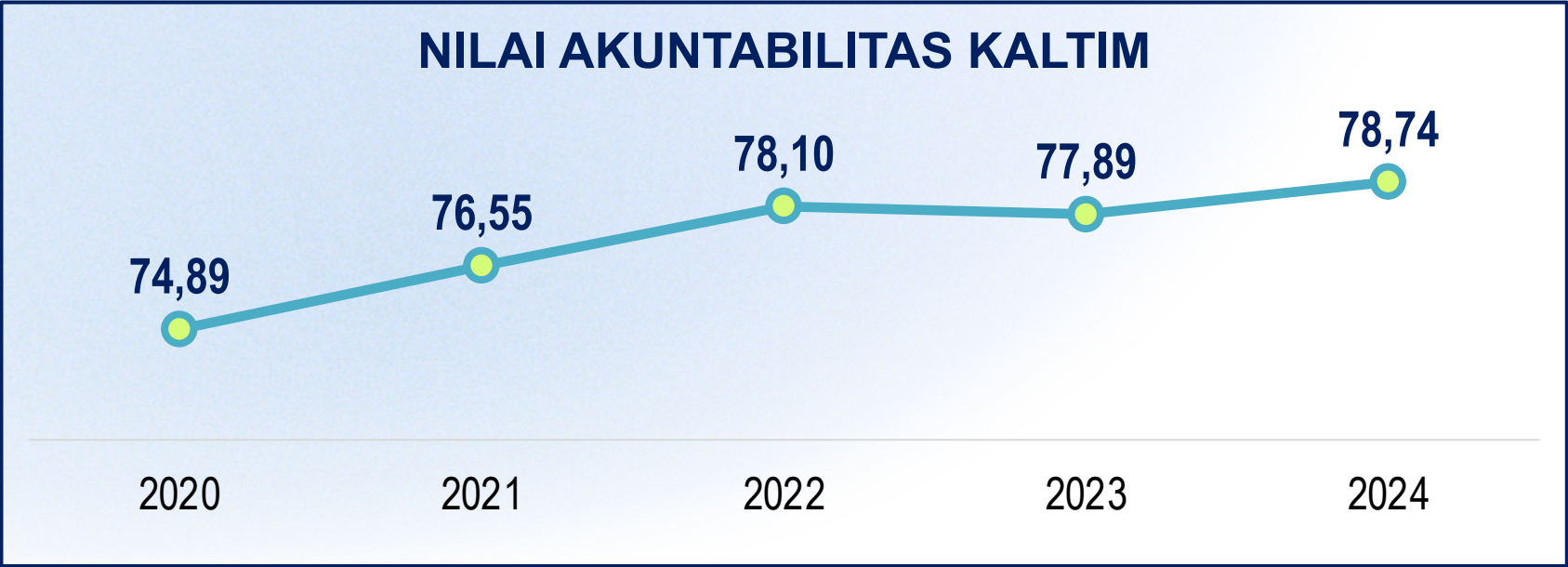
Sumber : DLH Kaltim, 2025



Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi KALTIM, 2024



Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB, 2024



Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB, 2024

RANCANGAN AWAL RPJMD KALTIM TAHUN 2025-2029



PENDEKATAN PENYUSUNAN RANWAL RPJMD TAHUN 2025-2029

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 mempedomani dan memperhatikan:

- **Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur/Wakil Gub;**
- **RPJMN Tahun 2025-2029**, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan **Asta Cita** Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- **Rancangan Teknokratik RPJMD**, yang di dalamnya memuat rekomendasi kinerja dan rekomendasi kerja berdasarkan pendekatan teknokratik;
- **RPJPD Tahun 2025-2045**, yang telah memuat pentahapan arah kebijakan **Periode I** Tahun 2025-2029 dan pentahapan pertama dari masing-masing transformasi;
- **Hasil Evaluasi Tahun ke-1 RPD 2024-2026**, sebagai bahan perumusan permasalahan pembangunan daerah dan rekomendasi arah kebijakan RPJMD berikutnya;
- **KLHS RPJMD Tahun 2025-2029**, untuk mengintegrasikan agenda **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)** ke dalam dokumen RPJMD;
- **Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID)**, yang memuat peran **IPTEK** serta **Riset dan Inovasi** dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah;
- **Dokumen rencana pembangunan dan sektoral lainnya.**



Dilakukan penyesuaian terhadap PN, PHTC dan PSN RPJMN Tahun 2025-2029

8 MISI (ASTACITA)

- 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

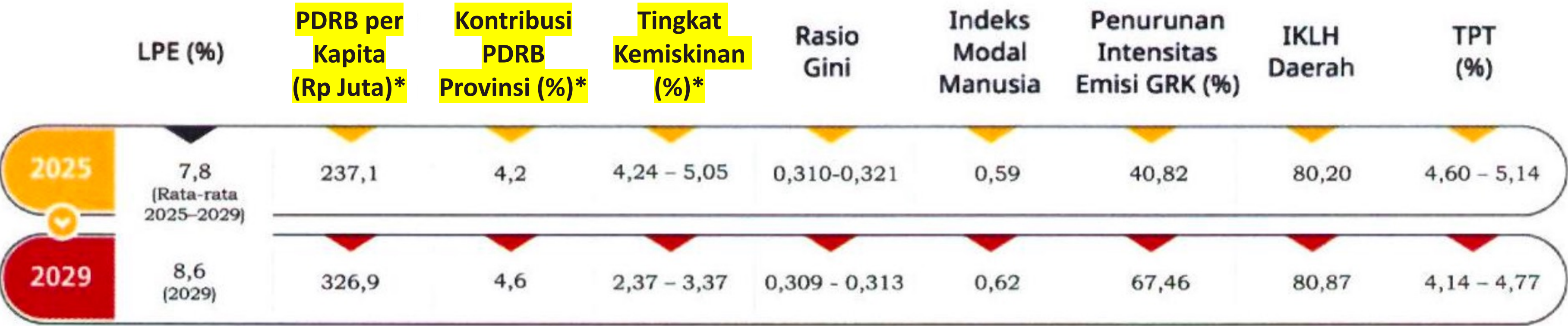
8 PHTC (QUICKWIN)

- 01** Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- 02** Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap.
- 03** Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- 04** Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
- 05** Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
- 06** Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
- 07** Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 08** Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber : Perpres 12/2025 ttg RPJMN 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN WILAYAH RPJMN UNTUK PROV. KALTIM (1)

Sasaran Pembangunan Kaltim dalam RPJMN 2025-2029



Highlight Intervensi Kebijakan

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A1	Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan–Berau A1: Kabupaten Berau	Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan–Berau , melalui: - Pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara - Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi - Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik dan listrik pedesaan - Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat - Pengembangan SDM TIK dan digitatisasi masyaralat - Perluasan layanan penyiaran digital

Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN WILAYAH RPJMN UNTUK PROV. KALTIM (2)

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
A2 A3 A4 A5 A6 A7	Kawasan <i>Superhub</i> Ekonomi Ibu Kota Nusantara - A2: Kota Samarinda - A3: Kota Balikpapan - A4: Kota Bontang - A5: Kabupaten Penajam Paser Utara - A6: Kabupaten Kutai Kartanegara - A7: Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan kawasan <i>superhub</i> ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui: - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung - Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara - Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara - Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara - Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hili kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu - Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar) - Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki - Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil - Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil - Peningkatan produksi pangan nabati - Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik/jalan/jembatan koridor logistik - Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut - Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara: pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian (Kota Balikpapan), Bandara APT Pranoto (Kota Samarinda), dan pengembangan bandara IKN (Kab. PPU) - Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi - Pengembangan transportasi berkelanjutan
A8 A9	Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan - A8: Kota Samarinda - A9: Kota Balikpapan	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Melalui Pengembangan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan
B1	Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur B1: Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat

ARAH KEBIJAKAN WILAYAH RPJMN UNTUK PROV. KALTIM (3)

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
D1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: KPP Agroekowisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata Kutai Kartanegara, melalui:
D2 D3	Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu • D3: Kec. Maratua, Kabupaten Berau	Pengembangan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas melalui: • Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan: Pembangunan sarana permukiman, pelayanan pendidikan, Kesehatan, konektivitas dan pengembangan Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau
D4	Kawasan Transmigrasi (KT) • D4: KT Kerang, Kabupaten Paser	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser
E1	Kawasan Konservasi Derawan • E1: Kabupaten Berau	Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
E2 E3 E4 E5 E6	Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) • E2: Kabupaten Berau • E3: Kabupaten Kutai Timur • E4: Kabupaten Kutai Kartanegara • E5: Kabupaten Mahakam Ulu • E6: Kabupaten Kutai Barat	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana
Provinsi Kalimantan Timur		Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui Pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik yang berkelanjutan
Provinsi Kalimantan Timur		Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sejenisnya secara partisipatif (hulu) beserta penanganannya (hilir)
Provinsi Kalimantan Timur		Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu dan berada di daerah afirmasi serta implementasi transisi energi

ARAH KEBIJAKAN WILAYAH RPJMN UNTUK PROV. KALTIM (4)

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T - Pembangunan konektivitas udara: Pembangunan Bandara Ujoh Bilang (Kab. Mahakam Ulu) - Pembangunan Rumah Sakit lengkap di Kabupaten: peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Mahakam Ulu
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan melalui: - Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi Peningkatan kualitas pelayanan rujukan
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
	Provinsi Kalimantan Timur	Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang STEAM, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna
	Provinsi Kalimantan Timur	Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat masyarakat adat melalui pembinaan talenta seni budaya

ARAH KEBIJAKAN WILAYAH RPJMN UNTUK PROV. KALTIM (5)

Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029 di Prov. Kalimantan Timur

PSN	Proyek	Lokasi	Pelaksana
Swasembada Energi			
Carry Over			
27	North Hub Development Project Selat Makassar	Kalimantan	Swasta
Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
Baru			
33	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	Swasta
34	Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat	PT MIND ID, Swasta

Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN TAHAP I RPJPD 2025-20245

Tahap 1

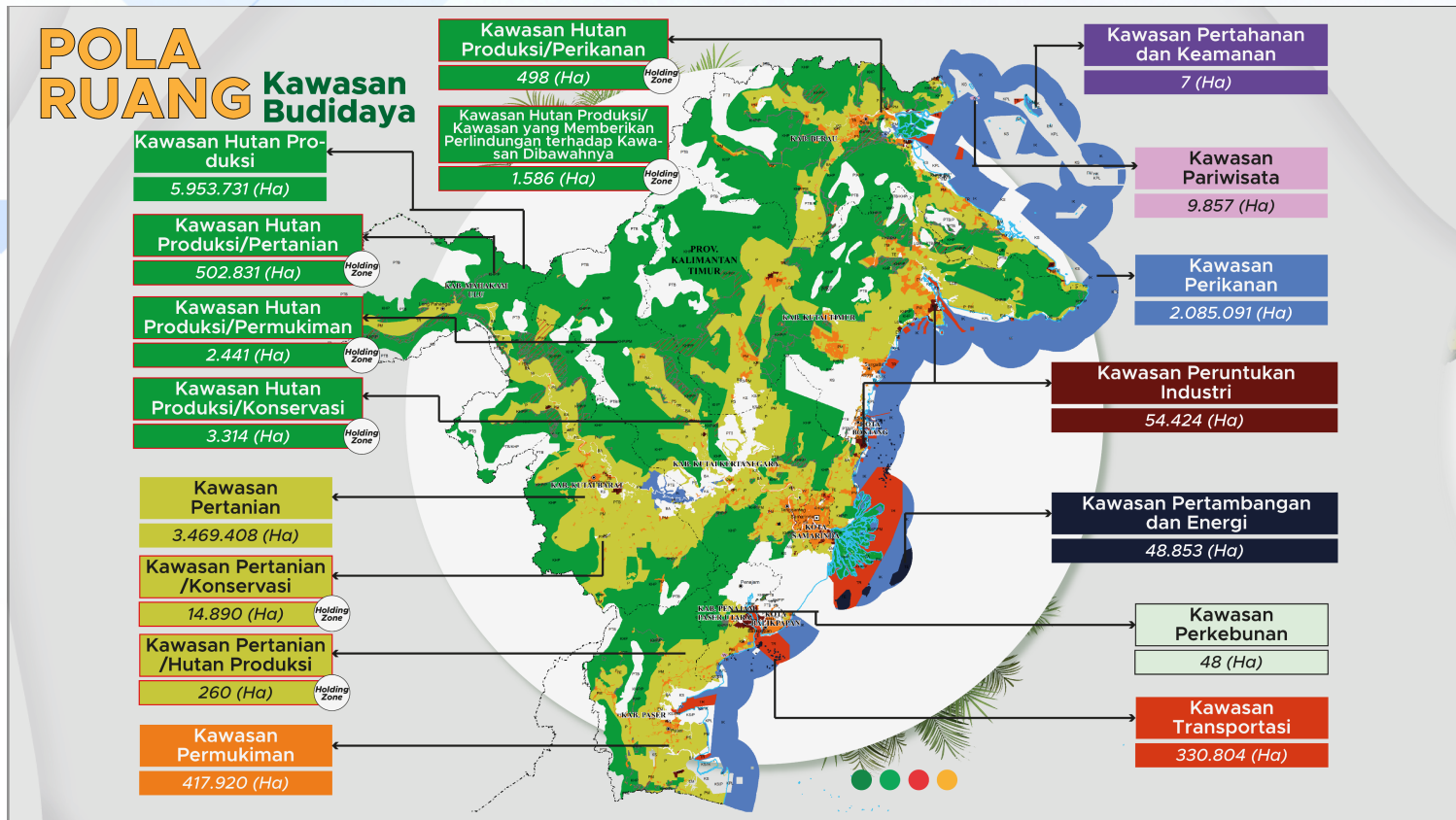
Penguatan Fondasi Transformasi

Pembangunan landasan transformasi sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN

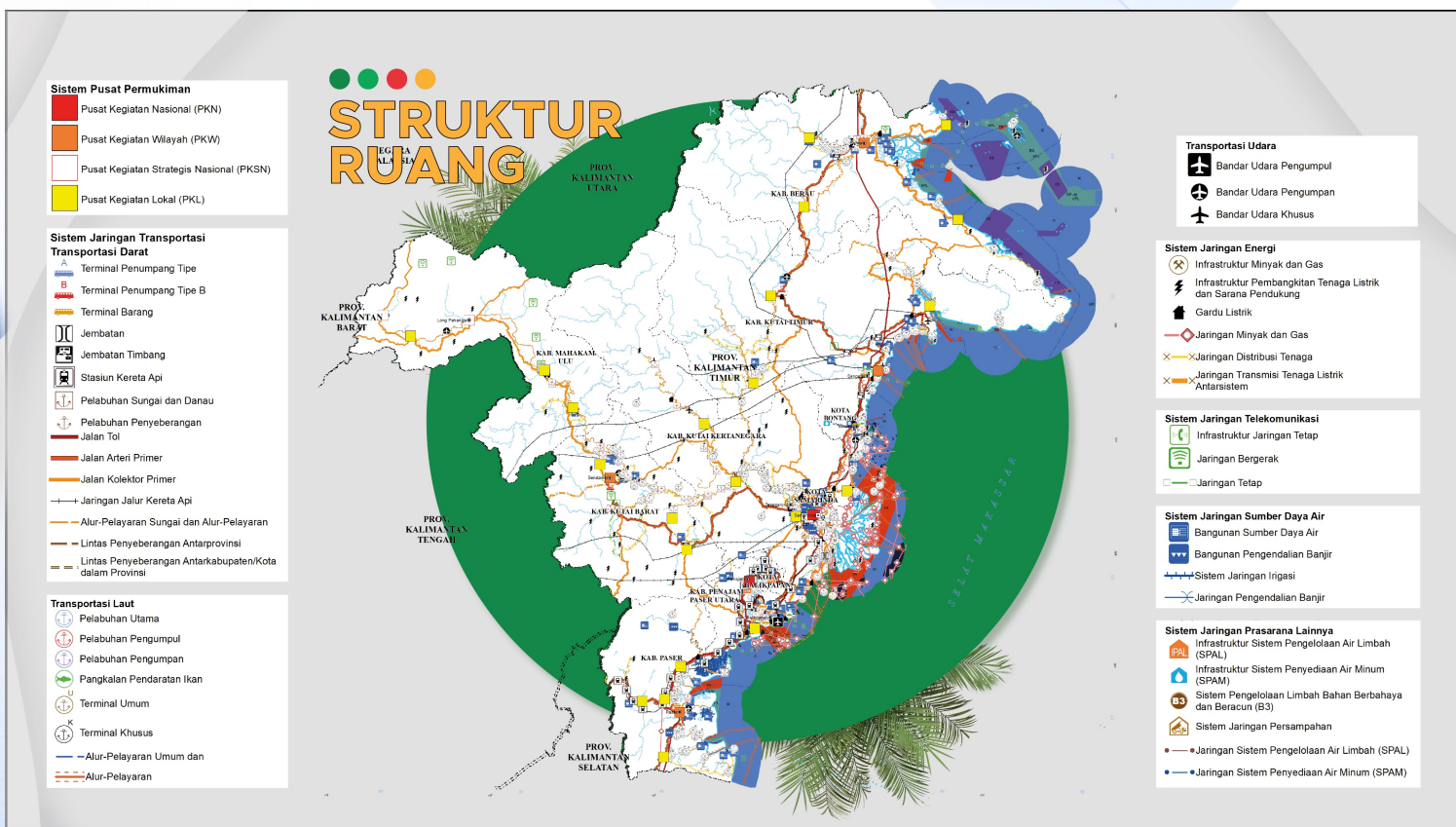
Misi	Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 (Tahun 2025-2029)
Misi 1: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
Misi 2: Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja
Misi 3: Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas	Peningkatan kualitas ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat
Misi 4: Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah	Penguatan supremasi hukum, keamanan dan ketangguhan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendorong peningkatan inklusifitas sosial
Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, aman dan didukung teknologi hijau
Misi 8: Mewujudkan Sinergitas dan Kestinambungan Pembangunan	Peningkatan kapasitas dan kolaborasi stakeholders pembangunan, akuntabilitas kinerja pemda, kualitas pengelolaan fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah

PENYELARASAN RPJMD DENGAN RTRW PROV. KALTIM 2025-2029

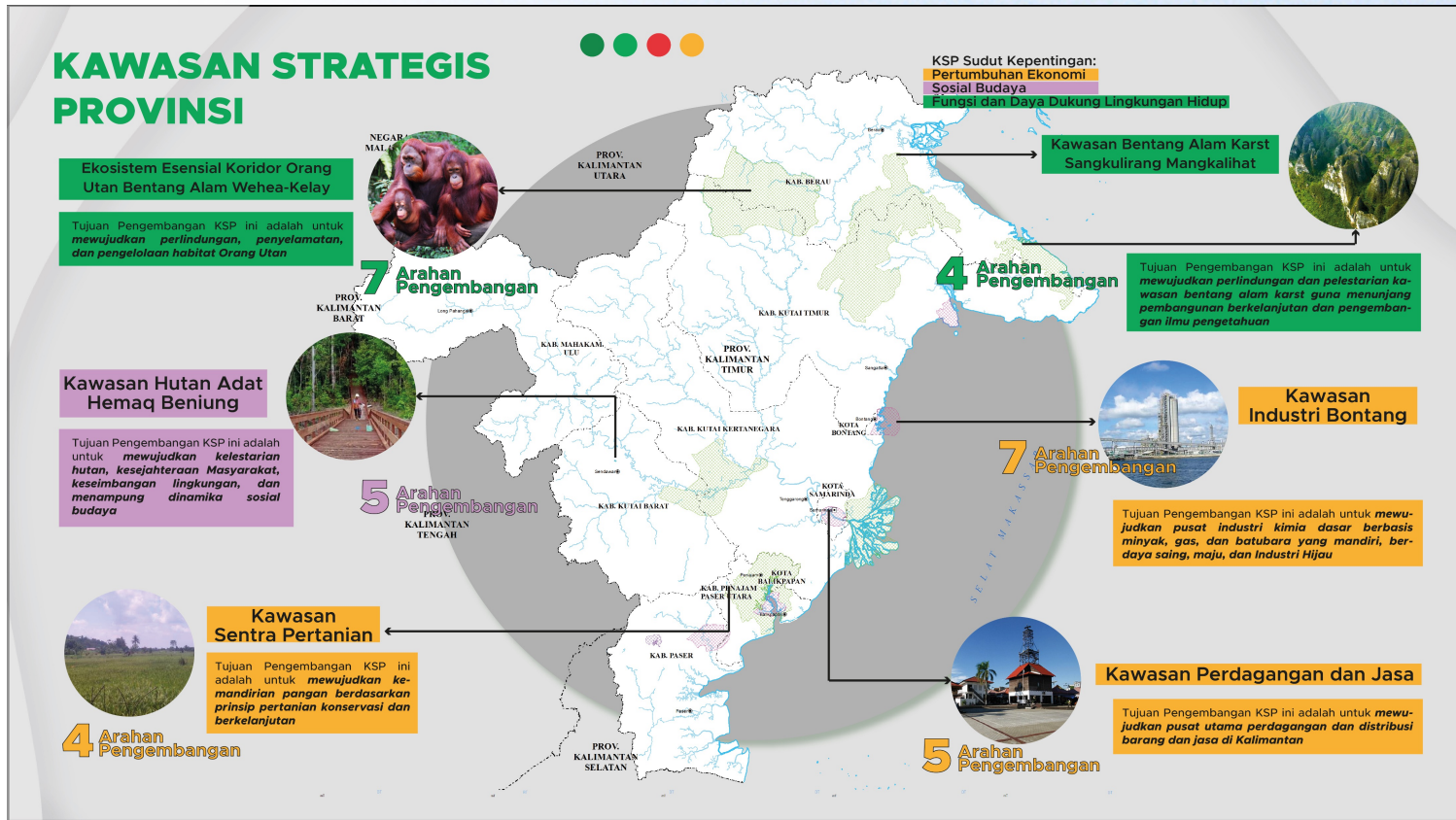
Keselarasan dengan Pola Ruang



Keselarasan dengan Struktur Ruang



Keselarasan dengan Kawasan Strategis Provinsi



No.	Program Prioritas	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	PJM-2 2025- 2029	PJM-3 2030- 2034	PJM-4 2035- 2039	PJM-5 2040- 2042
b.	Perwujudan Jalan Kolektor Primer Dua							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan 2) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 3) Survey kondisi jalan/jembatan 4) Pelebaran jalan menuju standar 5) Pelebaran jalan menambah lajur 6) Rekonstruksi jalan 7) Rehabilitasi jalan 8) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 9) Penggantian jembatan 10) Pelebaran jembatan 11) Rehabilitasi jembatan 12) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 13) Penanggulangan bencana/tanggap darurat	1. Jalan Suryanata (Samarinda); 2. Jalan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Samarinda Seberang); 3. Jalan KH. Wahid Hasyim II (Samarinda); 4. Simpang Batu CerminBatu Besaung-Simpang Empat Outer Ring Road IV; 5. Samarinda Seberang-Sanga Sanga; 6. Sanga Sanga-Dondang (Bentuas); 7. Simpang Samboja-Simpang Muara Jawa; 8. Jalan Mulawarman (Balikpapan); 9. Batas Balikpapan-Simpang Samboja; 10. Patung Lembuswana-Sebulu; 11. Simpang Empat Kaliorang-Talisayan; 12. Tanjung Redeb-Talisayan.	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi				

Indipro Perlu diselaraskan dalam RPJMD 2025-2029

RUMUSAN PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

1

Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

- IPM Mahulu (70,79), Kubar (74,76), PPU (74,94) masih berada dibawah Nasional (75,02);
- Dominasi pekerja lulusan <SD (24,4%) dan SMA (27,6%);
- Angka Putus Sekolah SMA/SMK 18,16%;
- TPT Kaltim (5,14%) masih diatas Nasional (4,91%);
- Masih tingginya angka prevalensi stunting (22,9%);
- Kemiskinan PPU, Kukar, Kutim, Paser, Kubar, Mahulu >5%.

PENDUDUK BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 2022-2024 (%)



Sumber : BPS Kaltim, 2024

2

Masih lambatnya transformasi ekonomi

- Dominasi sektor pertambangan dan penggalian (38,38%);
- Perlambatan laju pertumbuhan sektor industri (0,23%) dan sektor pertanian (2,38%);
- Terhambatnya pengembangan kawasan peruntukan industri Superhub Ekonomi IKN (Kariangau, Buluminung, Maloy).

3

Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi

- Jalan provinsi rusak berat 111,46 km & rusak ringan 55,55 km;
- Jalan nasional rusak berat 100,5 km & rusak ringan 136,41 km;
- Belum adanya konektivitas darat menuju Ujoh Bilang;
- Belum adanya bandara udara di Ujoh Bilang;
- Cakupan layanan air minum baru mencapai 83,71% serta adanya krisis air bersih di Kota Balikpapan dan Bontang;
- Cakupan akses sanitasi layak 84,23%;
- Belum optimalnya infrastruktur SDA penunjang pertanian;
- Belum optimalnya infrastruktur penunjang pariwisata dan KI

RUMUSAN PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

4

Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah

- Gini ratio Kaltim paling tinggi di Pulau Kalimantan (0,321);
- Indeks Williamson relatif tinggi pada angka 0,423;
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah perkotaan dan pesisir timur relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah barat.

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH
(INDEKS WILLIAMSON) KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sumber : BPS Kaltim, 2024

5

Tingginya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup

- Indeks kualitas air yang kurang baik (52,64);
- Jumlah sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah masih rendah (17,59%);
- Alih fungsi lahan karena desakan aktifitas ekonomi;
- Kerusakan lingkungan akibat kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan.

6

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja (78,74);
- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik (3,75);
- Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Merit (271);
- Belum optimalnya pembangunan zona integritas (0,5);
- Belum optimalnya sistem pengawasan intern pemerintah (3,2).

ISU STRATEGIS EKSTERNAL

ISU GLOBAL

- Pelaksanaan agenda SDG's
- Urbanisasi masyarakat dunia
- Komitmen transisi energi
- Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia
- Konflik antar-negara
- Globalisasi tenaga kerja
- Perkembangan teknologi
- Tantangan perubahan iklim
- Ketahanan pangan

ISU NASIONAL

- Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN
- Investasi sektor SDM
- Penanganan stunting
- Penurunan kemiskinan
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- Kebijakan ekonomi hijau dan biru
- Pelaksanaan Astacita dan PSN
- 3 Agenda Transformasi

ISU REGIONAL

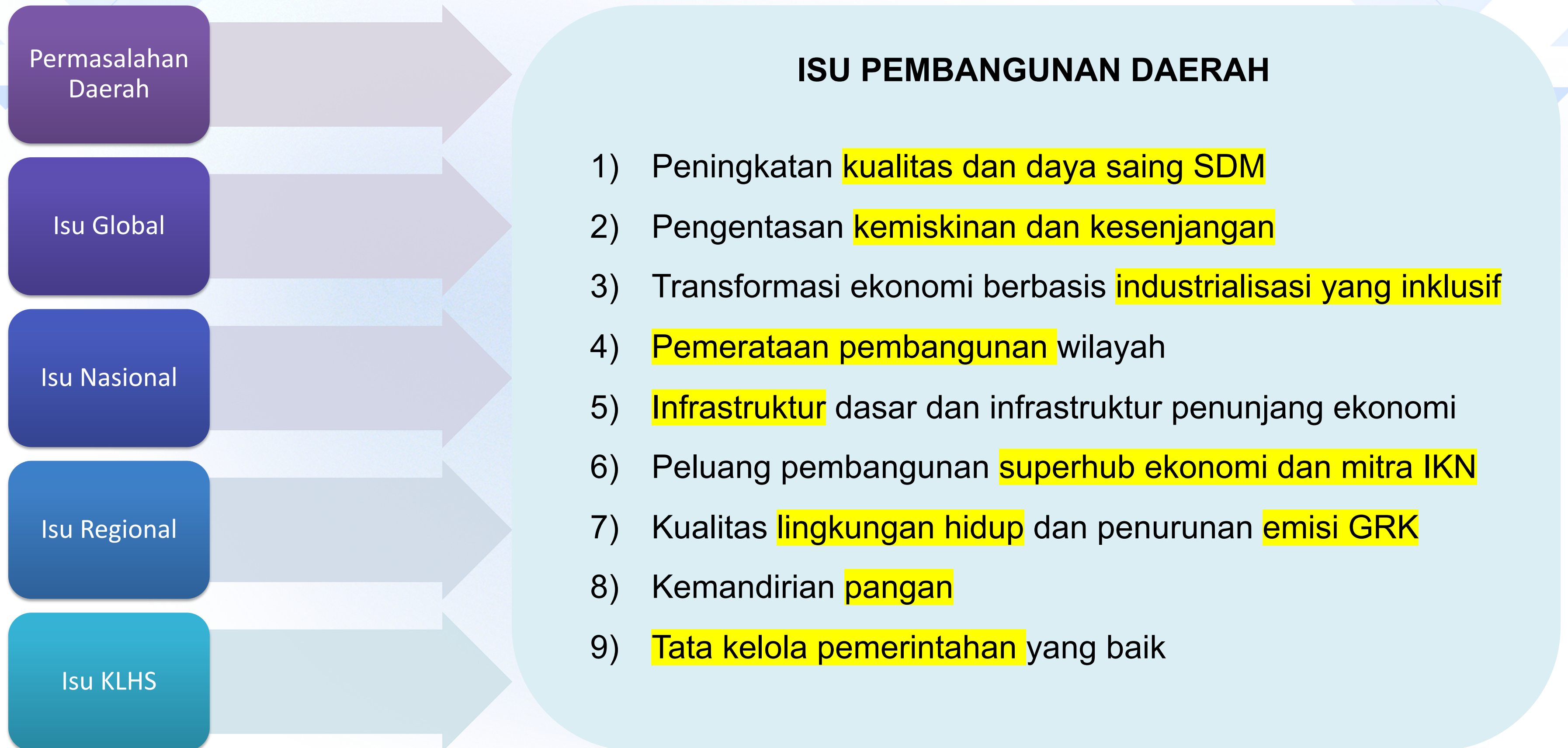
- kemiskinan dan kesenjangan
- Kualitas SDM lokal
- *Link & match* pendidikan-DUDI
- Pemenuhan SPM
- Pengembangan Industri
- Konektivitas wilayah
- Diversifikasi ekonomi
- Kerusakan ekosistem
- Ketahanan pangan
- Minimnya pusat pertumbuhan

ISU KLHS

- Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan
- Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender
- Industri, inovasi, dan infrastruktur

- Pembangunan ramah lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi
- Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)
- Penanganan dampak pemindahan IKN

RUMUSAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH



VISI RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029

**BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU
INDONESIA EMAS 2045**



**VISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025-2029**

KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS



Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
Gubernur Kalimantan Timur



Ir. H. Seno Aji, M.Si
Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah harus dapat menjamin terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa **“Semua Bisa Sukses”**.

KALTIM SUKSES

Dimaknai dengan keberhasilan membangun Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional di Kawasan Timur Indonesia yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan

GENERASI EMAS

Dimaknai dengan adanya tekad dan semangat kuat untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif

MISI PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2025-2029

01

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera

02

Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah

03

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan

04

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi

05

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

06

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

PROGRAM UNGGULAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2025-2030

GRATISPOL

1. Gratis Bersekolah SMA/K Hingga S3
2. Gratis Biaya Berobat & Layanan Kesehatan
3. Gratis Makanan Bergizi
4. Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa
5. Gratis Seragam Sekolah
6. Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah
7. Gratis Haji dan Umrah Untuk Marbot

16 Kegiatan Unggulan dan Arah Kebijakan Unggulan akan di-internalisasi ke dalam RPJMD Kaltim dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029

JOSPOL

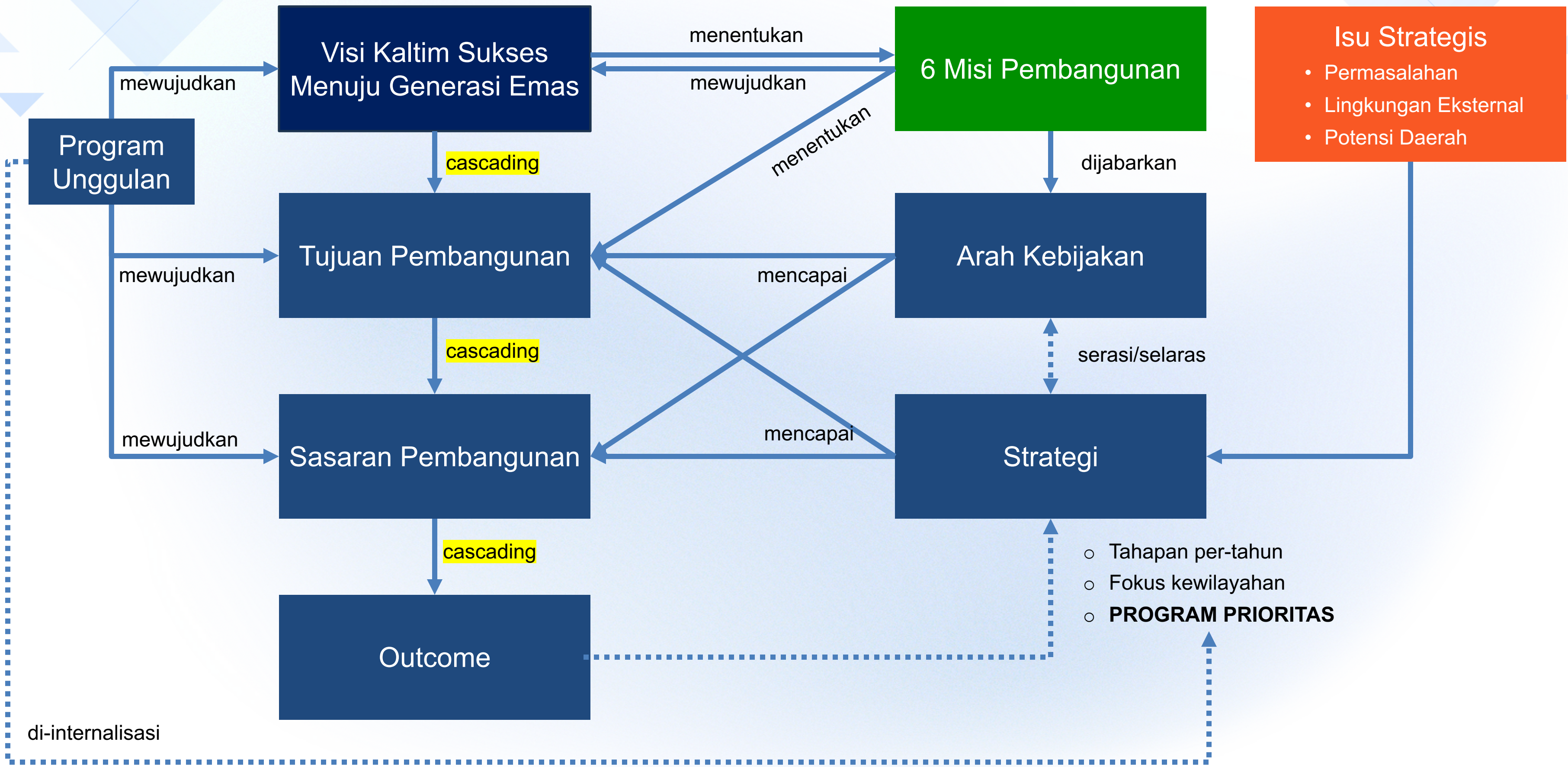
1. Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan & perluasan areal tanam berbasis pertanian modern
2. Pengembangan teknologi & inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri & layanan publik
3. Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah
4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM
5. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa
6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan
7. Pembangunan infrastruktur di seluruh kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional
8. Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata
9. Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemda, pusat, & swasta

KESELARASAN MISI RPJMD DENGAN ASTACITA DAN RPJPD

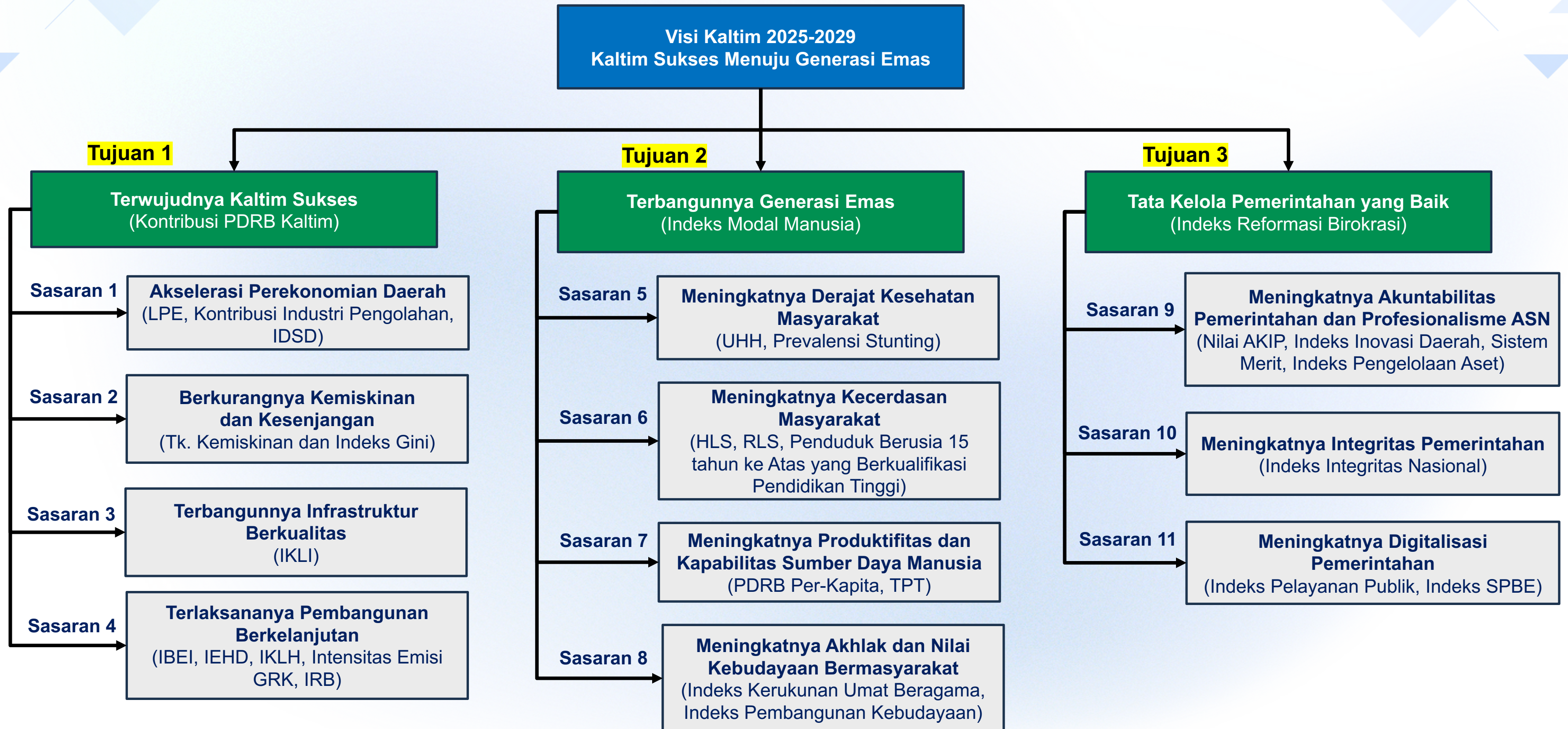
6 MISI RPJMD KALTIM 2025-2029	8 MISI (ASTACITA) PRESIDEN 2025-2029	8 MISI RPJPD KALTIM 2025-2045
MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera	ASTACITA - 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	MISI 1 Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera
MISI 2 Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah	ASTACITA - 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	MISI 2 Transformasi Ekonomi dengan Mengoptimalkan Peran sebagai Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara
	ASTACITA - 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	MISI 4 Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah
	ASTACITA - 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	
MISI 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan	ASTACITA - 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	MISI 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
		MISI 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	ASTACITA - 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	MISI 3 Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Berintegritas
MISI 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	ASTACITA - 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	MISI 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal
MISI 6 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	ASTACITA - 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	

MISI 8
Mewujudkan Sinergitas dan Kesenambungan Pembangunan

ARSITEKTUR PENYUSUNAN RPJMD KALTIM 2025-2029



RUMUSAN AWAL TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029



TARGET INDIKATIF TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029 (1)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES								
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,90	3,92–3,95	3,95–3,97	3,97–3,99	3,99–4,00	4,00–4,01	4,01–4,05
Sasaran 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,17–6,40	6,40–7,20	7,20–8,30	8,30–8,50	8,50–8,60	8,60–8,75
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	18,26–18,28	18,28–18,46	18,46–18,74	18,74–19,27	19,27–20,03	20,03–21,04
	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,30*	3,35–3,40	3,40–3.45	3,45–3.49	3,49–3.53	3,53–3,57	3,57–3,62
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,05–5,78	4,70–5,20	4,20–4,70	3,70–4,20	3,37–3,70	3,06–3,37
	Indeks Gini (indeks)	0,321	0,310–0,321	0,313–0,318	0,308–0,313	0,303–0,308	0,298–0,303	0,293–0,298
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (indeks)	7,89	7,89–8,01	8,01–8,13	8,13–8,26	8,26–8,38	8,38–8,50	8,50–9,00
Sasaran 4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia Blue Economy Index (indeks)	NA	27,04–32,92	32,92–38,81	38,81–44,69	44,69-50,58	50,58–56,46	56,46–62,35
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	63,04*	65,42–68,66	68,66–71,89	71,89–75,13	75,13–78,36	78,36–81,59	81,59–84,83
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,63	76,63–80,20	80,20–80,52	80,52–80,83	80,83–81,15	81,15–81,46	81,46–81,78
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,59	38,59–40,82	55,05–60,70	60,70–60,80	60,80–65,90	65,90–67,46	67,46–72,63
	Indeks Risiko Bencana (indeks)	136,11	131,64–136,11	127,17–131,64	122,70–127,17	118,23–122,70	113,76–114,56	108,83–113,76

Ket: *) Capaian Tahun 2023

TARGET INDIKATIF TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029 (2)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS								
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,94	74,94–75,17	75,17–75,40	75,40–75,62	75,62–75,85	75,85–76,08	76,08–76,31
	Prevalensi Stunting (%)	22,90*	19,80–21,35	18,73–19,80	17,65–18,73	16,58–17,65	15,50–16,58	14,29–15,50
Sasaran 6 : Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,03	14,12–14,13	14,13–14,23	14,23–14,32	14,32–14,42	14,50–14,51	14,51–14,60
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,02	10,55–10,57	10,57–10,75	10,75–10,93	10,93–11,10	11,10–11,28	11,28–11,59
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,11*	13,80–14,50	14,50–15,19	15,19–15,89	15,89–16,58	16,58–17,28	17,28–17,97
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	212,18	212,18–221,55	221,55–232,10	232,10–246,65	246,65–263,58	263,58–282,92	282,92–305,14
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,50–4,82	4,30–4,77	4,14–4,75	3,95–4,68
Sasaran 8 : Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,19	78,19–78,50	78,50–78,80	78,80–79,11	79,11–79,41	79,67–79,72	79,72–80,12
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,56*	58,80–58,84	58,84–59,46	59,46–60,08	60,08–60,69	61,18–61,31	61,31–61,93

Ket: *) Capaian Tahun 2023

TARGET INDIKATIF TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029 (3)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
KONDISI PEMUNGKIN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK								
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	85,16	85,16–85,84	85,84–86,53	86,53–87,22	87,22–87,92	87,92–88,63	88,63–89,34
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP (nilai)	78,74	78,50–79,19	79,19–79,78	79,78–80,36	80,36–80,95	80,95–81,54	81,54–82,13
	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	61,74	61,7462,87	62,87–64,00	64,00–65,13	65,13–66,26	66,26–67,39	67,39–68,52
	Sistem Merit (skor)	271*	279–286	286–294	294–301	301–309	309–316	316–324
	Indeks Pengelolaan Aset (indeks)	2,26	2,26–2,33	2,33–2,40	2,40–2,47	2,47–2,54	2,54–2,61	2,61–2,69
Sasaran 10 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional (indeks)	72,75	75,75–75,84	75,84–76,81	76,81–77,78	77,78–78,75	78,75–79,72	79,72–80,91
Sasaran 11 : Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,00*	4,03–4,06	4,06–4,09	4,09–4,12	4,12–4,14	4,14–4,17	4,17–4,20
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,79	3,79–3,85	3,85–3,91	3,91–3,97	3,97–4,03	4,03–4,09	4,09–4,15

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA

- 1) Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun kepada seluruh lapisan Masyarakat;
- 2) Pemberian biaya sekolah dan perkuliahan yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh warga sampai tingkat S3;
- 3) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan secara proporsional;
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (termasuk GTK) serta mendorong pendidikan unggul di semua daerah secara bertahap;
- 5) Pengembangan perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus;
- 6) Penanganan stunting, eliminasi penyakit menular (TBC dan Malaria), dan kesadaran penerapan pola hidup bersih dan sehat;
- 7) Penurunan penduduk miskin serta perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat, terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 8) Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas;
- 9) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
- 10) Peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran;
- 11) Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan;
- 12) Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan dan dokter spesialis.

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 2: MEWUJUDKAN KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI PUSAT EKONOMI BARU YANG INKLUSIF BERBASIS INDUSTRIALISASI KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

- 1) Perluasan dan percepatan hilirisasi produk unggulan daerah;
- 2) Percepatan pengembangan pusat kegiatan kawasan industri;
- 3) Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting seperti pengembangan industri berbasis oleokimia dan petrokimia;
- 4) Peningkatan hasil produksi komoditas unggulan pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan;
- 5) Peningkatan kemandirian pangan;
- 6) Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan sebagai perwujudan penerapan *blue economic*;
- 7) Prioritas pengembangan talenta wirausaha berbasis pada UMKM;
- 8) Perluasan kerja sama perdagangan antar daerah dan antar negara dalam rangka memperkuat rantai nilai;
- 9) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi;
- 10) Penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran alur barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan;
- 11) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
- 12) Pembangunan pusat distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan pangan di Kalimantan Timur;

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MENUNJANG KEGIATAN PEREKONOMIAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEHATAN

- 1) Peningkatan **jalan mantap** di seluruh wilayah Kalimantan timur;
- 2) Membangun **kemudahan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi** hingga seluruh wilayah;
- 3) Pembangunan **sarana irigasi, bendungan, jalan usaha tani dan sarana pertanian lainnya** untuk peningkatan produktivitas komoditas pertanian;
- 4) Pengembangan **superhub ekonomi IKN dan mitra IKN**;
- 5) Pengembangan **kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan IKN**;
- 6) Pembangunan dan pengembangan **prasarana terminal, bandara, pelabuhan sungai dan laut**;
- 7) Pengembangan **sarana transportasi darat, sungai dan laut yang memadai**;
- 8) Penyediaan **jaringan dan layanan listrik yang andal yang mengarah pada pemanfaatan EBT**;
- 9) Pemenuhan **akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif**;
- 10) Perluasan **jaringan internet** untuk percepatan penerapan teknologi informasi bagi kehidupan masyarakat;
- 11) Penguatan **pembangunan kawasan perdesaan** yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan;
- 12) Percepatan **pembangunan kemaritiman** untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir;
- 13) Percepatan **pembangunan daerah pedalaman dan perbatasan**;
- 14) Peningkatan dan pembangunan **sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit**;
- 15) Pengembangan **pembiayaan inovatif** dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran Pembangunan.

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 4: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, PROFESSIONAL DAN BERINTEGRITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- 1) Optimalisasi penerapan sistem merit pemerintahan;
- 2) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan;
- 3) Pelayanan publik pada kategori sangat baik;
- 4) Digitalisasi seluruh layanan pemerintahan;
- 5) Penciptaan pola pengaduan masyarakat secara luas dan transparan dan respon cepat untuk penyelesaian aduan;
- 6) Penegakan integritas pegawai;
- 7) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja;
- 8) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
- 9) Peningkatan produktivitas BUMD;
- 10) Peningkatan kapasitas fiskal daerah.

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA, PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

- 1) Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat;
- 2) Penguatan karakter dan budaya asli daerah dalam kerangka NKRI;
- 3) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;
- 4) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini;
- 5) Peningkatan penerapan kurikulum bermuatan lokal;
- 6) Pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
- 7) Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya;
- 8) Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter;
- 9) Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya;
- 10) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 6: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

- 1) Pembangunan **pengelolaan sampah dan limbah, serta peningkatan daur ulang** serta terpadu antar daerah;
- 2) Peningkatan **ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan ekologi**;
- 3) Pemahaman dan penerapan **kehidupan berwawasan lingkungan** oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Pemerataan terhadap **akses hunian layak**;
- 5) Penanganan **kawasan kumuh**;
- 6) Perlindungan dan rehabilitasi **hutan dan lahan gambut**;
- 7) Rehabilitasi dan pemanfaatan **lahan pasca tambang**;
- 8) Pelestarian **bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan** berbasis kearifan lokal;
- 9) Perencanaan **tata ruang yang berwawasan lingkungan**;
- 10) Peningkatan **mitigasi penanggulangan bencana**.

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025-2029 (1)

TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses			
Sasaran 1: Akselerasi Perekonomian Daerah	1	Program Pengembangan Ekspor	DPPKUKM
	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DPPKUKM
	3	Program Pengembangan UMKM	DPPKUKM
	4	Program Pemberdayaan UMKM	DPPKUKM
	5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian*	DPTPH, DISBUN, DPKH
	6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*	DPTPH, DISBUN, DPKH
	7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP
	8	Program Pengelolaan Hutan*	DISHUT
	9	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan*	DISHUT
	10	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPAR
	11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
	12	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
	13	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
	14	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DPKH

Ket: *) Program prioritas yang mengungkit lebih dari satu sasaran pembangunan

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025-2029 (2)

TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses			
Sasaran 2: Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
	2	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
	3	Program Penanganan Bencana	DINSOS
	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMPD
	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMPD
	6	Program Kawasan Permukiman*	DPUPRPERA
	7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DPTPH
	8	Program Kerawanan Pangan	DPTPH
Sasaran 3: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	1	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPRPERA
	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	DPUPRPERA
	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPRPERA
	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPRPERA
	5	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPRPERA
	6	Program Pengembangan Perumahan	DPUPRPERA
	7	Program Kawasan Permukiman*	DPUPRPERA
	8	Program Peningkatan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DPUPRPERA

Ket: *) Program prioritas yang mengungkit lebih dari satu sasaran pembangunan

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025-2029 (3)

TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses			
Sasaran 3: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
	10	Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
	11	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	DISKOMINFO
	12	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	DESDM
	13	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DPTPH
Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	1	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
	2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	DLH
	3	Program Pengelolaan Hutan*	DISHUT
	4	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DISHUT
	5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DISHUT
	6	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan*	DISHUT
	7	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)	DESDM
	8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
	9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP
	10	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DKP
	11	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	12	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DPPKUKM

Ket: *) Program prioritas yang mengungkit lebih dari satu sasaran pembangunan

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025-2029 (4)

TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas			
Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES
Sasaran 6: Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat	1	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
	2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DISDIKBUD
Sasaran 7: Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
	3	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A
	4	Program Penyuluhan Pertanian	DPTPH, DISBUN, DPKH
Sasaran 8: Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	KESBANGPOL
	2	Program Kesejahteraan Rakyat	BIRO KESRA

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025-2029 (5)

TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	1	Program Penataan Organisasi	BIRO ORGANISASI
	2	Program Kepegawaian Daerah	BKD
	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
	4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM
	5	Program Riset dan Inovasi Daerah	BALITBANGDA
Sasaran 10: Meningkatnya Integritas Pemerintahan	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
Sasaran 11: Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	DISKOMINFO

Ket: *) Program prioritas yang mengungkit lebih dari satu sasaran pembangunan

JUMLAH INDIKASI PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029

60 Program Prioritas

GP-1. GRATIS BERSEKOLAH SMA/K HINGGA S3

Program Prioritas : 1. Program Pengelolaan Pendidikan (DISDIKBUD)
2. Program Kesejahteraan Rakyat (BIRO KESRA)

Gratispol Bersekolah



Sasaran : Siswa SMA/SMK/MA/SLB dan Mahasiswa S1, S2, S3
Instrumen : Optimalisasi BOSP dan pembayaran UKT
Ketentuan : Batasan pada usia produktif (untuk S1, S2, S3 ex. Sp.)
Lokasi : SMA/SMK/MA/SLB Kaltim, Institut/Univ dalam & luar Kaltim, LN

- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2025 : Rp796,7 Miliar
- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2030 : Rp1,1 Triliun (Angka Sementara, dalam proses perhitungan)

Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Terpenuhinya biaya sekolah SMA/SMK dan biaya kuliah S1, S2, S3 bagi warga Kaltim secara gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK	184.600 siswa	230.800 siswa
	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1, S2, S3 Dalam Kaltim	21.500 mahasiswa	108.000 mahasiswa
	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1, S2, S3 Luar Kaltim	650 mahasiswa	1.600 mahasiswa
	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2 dan S3 Luar Negeri	60 mahasiswa	130 mahasiswa
	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus/ Kerjasama	1.500 mahasiswa	2.000 mahasiswa

GP-2. GRATIS BIAYA BEROBAT DAN LAYANAN KESEHATAN

Program Prioritas : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DINKES)

Gratispol Berobat

BPJS-PBI
(Penerima Bantuan Iuran)

BPJS-PPBU*
(Pekerja Penerima Upah
Badan Usaha)

BPJS-Mandiri
(bukan penerima upah dan
bukan pekerja)

Kel. Sasaran : Seluruh warga ber-KTP Kalimantan Timur

Instrumen : BPJS Aktif

Ketentuan : Kelas III

Lokasi : Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang melayani BPJS

○ Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2025 : Rp 231,4 Miliar

○ Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2030 : Masih dalam proses perhitungan

Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Terpenuhinya biaya berobat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur secara gratis	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan BPJS Kelas III	90%	100%

*) bagi yang berhenti kerja/di-PHK

Ket : - seluruh kab/kota di Kaltim telah mencapai UHC

- seluruh penduduk bisa berobat ke Fasyankes BPJS dengan menunjukan KTP

GP-3. GRATIS MAKANAN BERGIZI

Program Prioritas : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DINKES)

Gratispol Makanan Bergizi

Dukungan Pelaksanaan
MBG Nasional*

PMT Ibu Hamil

PMT Ibu Menyusui

PMT Baduta
(Bayi dua tahun)

Kel. Sasaran : Ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi dua tahun
Instrumen : Posyandu
Ketentuan : Diutamakan pada Keluarga Beresiko Stunting (KRS)
Lokasi : 10 kabupaten/kota (bertahap)

o Keseluruhan pembiayaan Tahun 2025-2029 bersumber dari APBN

Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Diberikannya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan anak bayi dua tahun	Jumlah pemberian PMT untuk ibu hamil dan ibu menyusui	5.800 orang*	6.800 orang*
	Jumlah pemberian PMT untuk bayi dua tahun	33.500 orang*	39.200 orang*

Ket *) Angka Sementara, masih dalam proses perhitungan

APBD :

- Program hidup sehat tanpa stunting (PESUT)
 - Peningkatan kapasitas kader dan kelembagaan Posyandu
- Tahun 2025: Pilot Project di Kota Bontang

*) dukungan pengendalian pelaksanaan dan rantai pasok

GP-4. GRATIS WIFI INTERNET DI SELURUH DESA

Program Prioritas : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (DISKOMINFO)

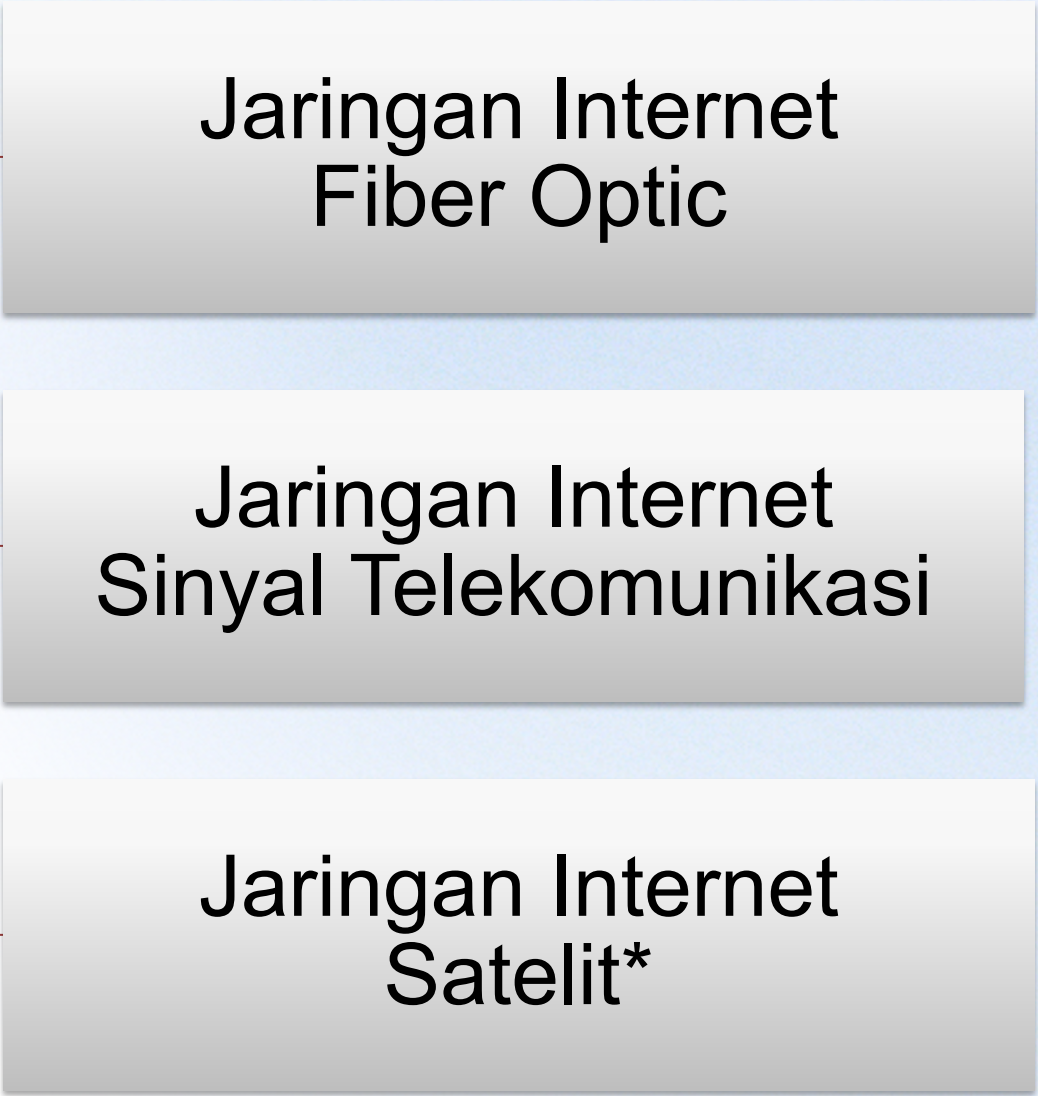
Kel. Sasaran : Masyarakat perdesaan
Instrumen : Penyediaan perangkat & biaya berlangganan internet
Ketentuan : - Memperkuat pengawasan penggunaan internet
- Dikembangkan menjadi desa digital
Lokasi : 841 desa di Kalimantan Timur

- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2025 : Rp7,56 Miliar
- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2030 : Rp10 Miliar

Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Tersedianya fasilitas internet desa gratis yang aktif	Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	841 desa	841 desa
	Jumlah desa yang memiliki pojok internet aktif/ <i>village creative hub</i>	50 desa	250 desa

*) menggunakan produk Starlink atau sejenisnya

Gratispol Wifi Internet Desa



GP-5. GRATIS SERAGAM SEKOLAH

Program Prioritas : Program Pengelolaan Pendidikan (DISDIKBUD)

Gratispol Seragam Sekolah

Seragam SMA

Seragam SMK

Seragam MA

Seragam SLB

Kel. Sasaran : Siswa SMA/SMK/MA Kelas dan SLB negeri & swasta

Instrumen : Pembagian seragam sekolah gratis

Ketentuan : - 6 setel dan 1 sepatu sekolah
- Tahap 1 (hanya untuk siswa Kelas X)

Lokasi : Seluruh SMA/SMK/MA dan SLB di Kaltim (bertahap)

○ Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2025 : Rp102,4 Miliar

○ Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2030 : Rp573 Miliar

Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Tersedianya seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/MA dan SLB	Jumlah peserta didik Kelas X SMA/SMK/MA dan SLB yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	61.500 siswa	230.800 siswa

GP-6. GRATIS BIAYA ADMNISTRASI KEPEMILIKAN RUMAH

Program Prioritas : Program Kawasan Permukiman (DPUPRPERA)

Gratispol Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah

Gratis Admin Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

DP 0%*

Cicilan Ringan*

*) dilaksanakan oleh BUMD/Persuda

Kel. Sasaran : Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk pasangan baru menikah dan pengusaha pemula
Instrumen : Pembiayaan administrasi rumah, Pembangunan PSU
Ketentuan : Rumah tinggal pertama
Lokasi : Tertentu di 10 kab/kota

- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2025 : Rp10 Miliar
- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2030 : Masih dalam proses perhitungan

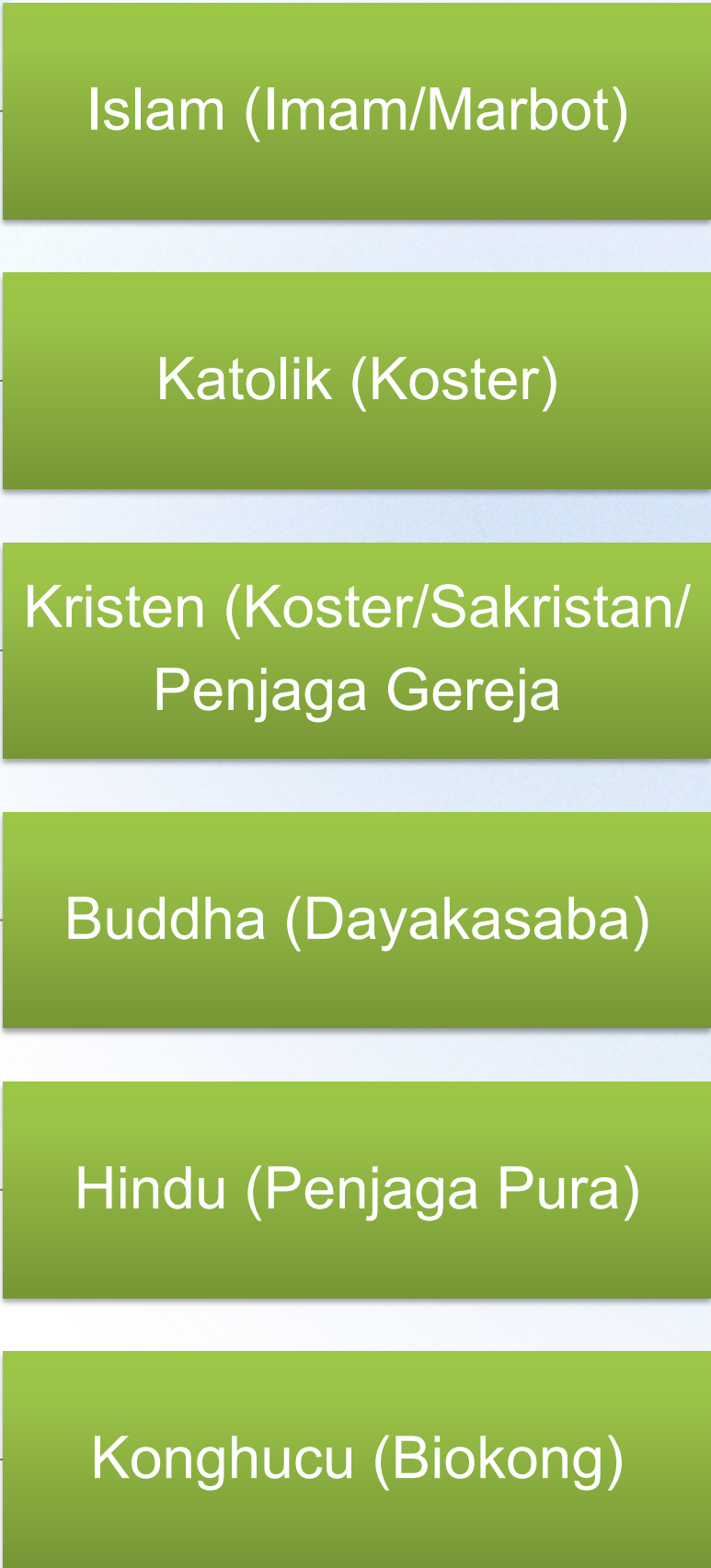
Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Tersedianya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen anak muda/ pengusaha pemula	Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah	1.000 orang	25.000 orang*

Ket *) Angka Sementara, masih dalam proses perhitungan

GP-7. GRATIS HAJI DAN UMROH UNTUK MARBOT

Program Prioritas : Program Kesejahteraan Rakyat (BIRO KESRA)

Gratispol Umroh dan Haji



Kel. Sasaran : Imam dan penjaga rumah ibadah

Instrumen : Pembiayaan umroh (perjalanan suci dan sejenisnya) dan pembiayaan pendaftaran kursi haji*

Ketentuan : - Imam dan penjaga rumah ibadah disahkan melalui SK
- Penerima manfaat tidak berulang

Lokasi : Seluruh Kalimantan Timur

- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2025 : Rp31,2 Miliar
- Perkiraan kebutuhan pembiayaan 2030 : Rp50,1 Miliar

Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		Tahun 2025	Tahun 2030
Diberikannya fasilitas pembiayaan umroh (perjalanan suci, dll) dan pendaftaran haji secara gratis bagi imam dan penjaga rumah ibadah	Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll)	750 orang	865 orang
	Jumlah penerima manfaat gratis pendaftaran haji (agama islam)*	0 orang (belum dilaksanakan)*	650 orang*

JP-3. PENINGKATAN INSENTIF GURU SEKOLAH UMUM, PESANTREN SERTA PENJAGA RUMAH IBADAH

- 1) Insentif guru sekolah (KB, TK, SD, MI, SMP, MTs) : 51.323 orang
- 2) Insentif ustadz dan ustadzah : dalam pendataan
- 3) Insentif penjaga rumah ibadah : 4.346 orang
- 4) Insentif dosen : dalam pendataan

JP-6. MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

I. Infrastruktur Kesehatan

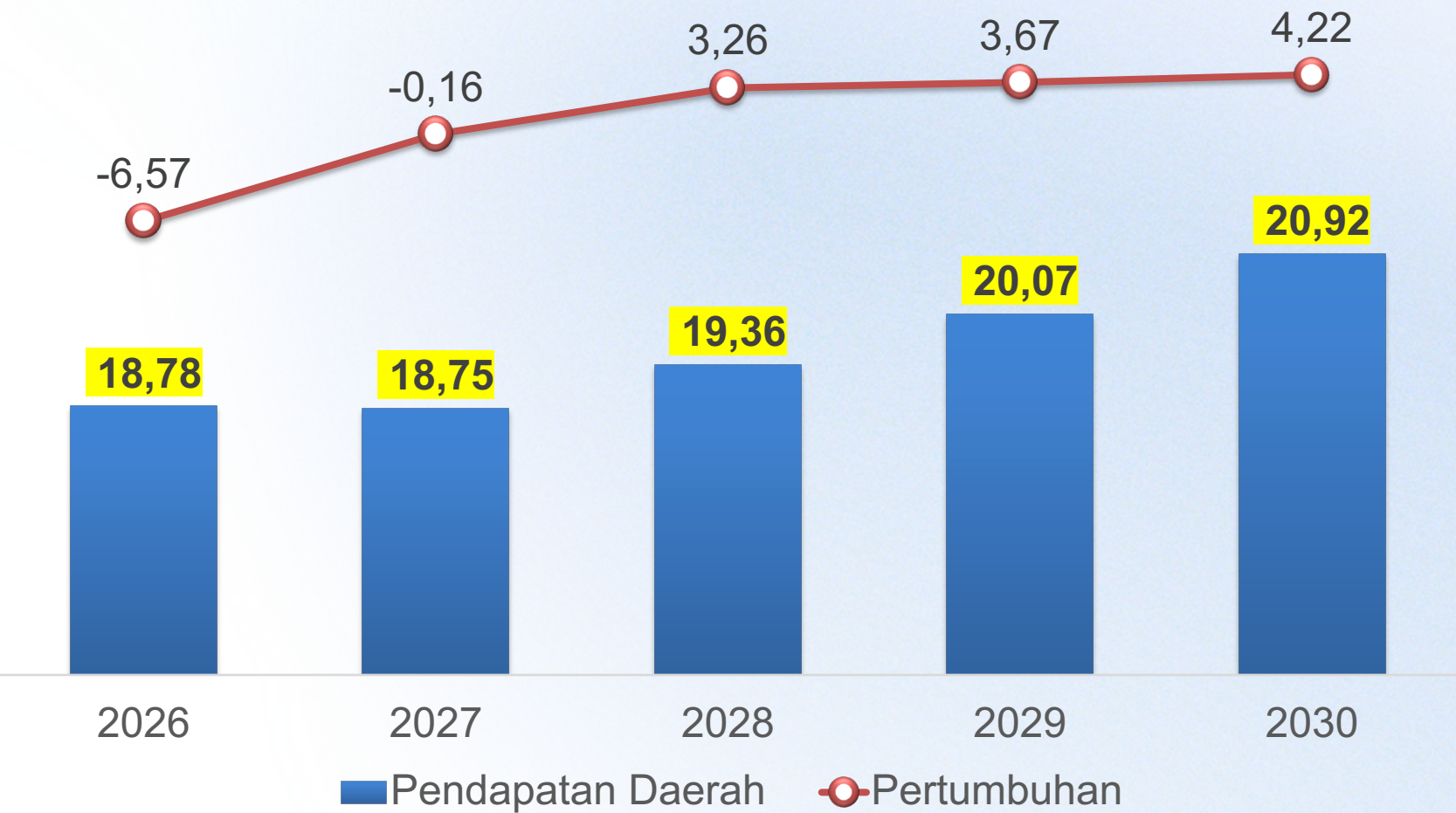
- 1) Pembangunan RSUD di ex RS Islam Samarinda
- 2) Pembangunan RSUD Atma Husada Sungai Kapih Samarinda
- 3) Pembangunan RSUD di Kabupaten Kutai Barat-Mahakam Ulu
- 4) Peningkatan RSUD AWS. Syahrane Samarinda dan RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan

II. Infrastruktur Pendidikan

- 1) Sekolah Unggulan (SMA dan SMK) di setiap kabupaten/kota
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Pendidikan SMA/SMK

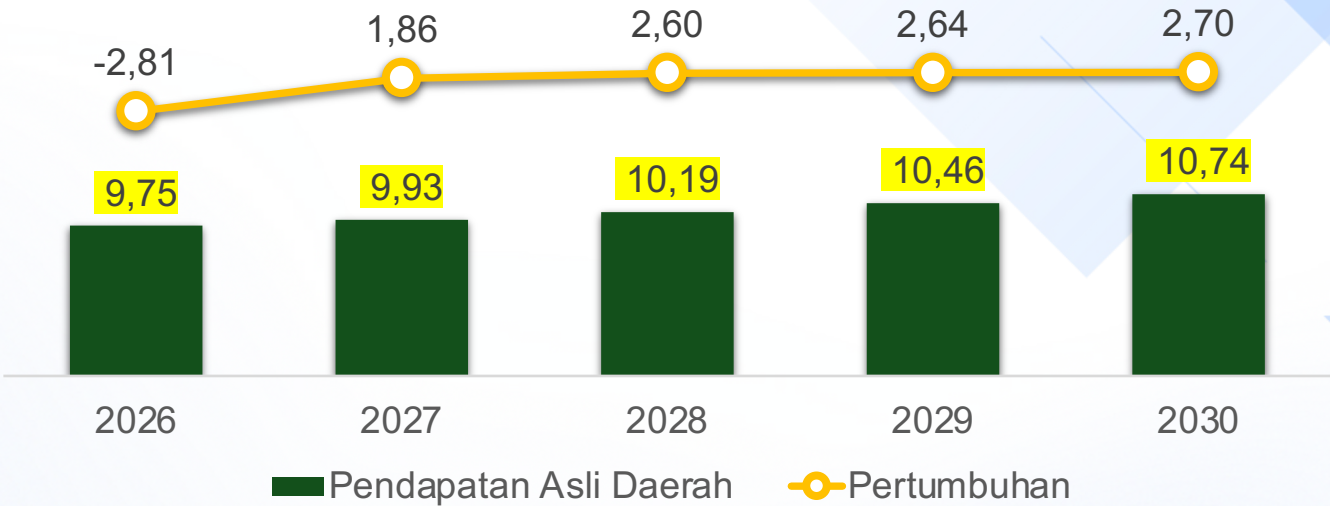
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 2026-2030

Pendapatan Daerah ≈ Proyeksi APBD
(Triliun Rupiah)



Ket : penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA belum diperhitungkan
Sumber: BAPENDA Kaltim, 2025

Pendapatan Asli Daerah (Triliun Rupiah)



Pendapatan Transfer (Triliun Rupiah)



Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Miliar Rupiah)



INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (1)

Kabupaten Paser

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	75,13	75,13–75,66	77,67–78,22
LPE (%)	3,77	3,77–3,80	6,69–6,78
Tingkat Kemiskinan (%)	8,63	7,50–8,63	4,02–4,15
Indeks Gini	0,271	0,270–0,271	0,240–0,242
TPT (%)	4,53	4,16–4,53	2,90–3,00

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Paser :

- 1) Penyediaan afirmasi akses pendidikan
- 2) Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan
- 3) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 4) Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan
- 5) Pengembangan ekonomi maritim
- 6) Pengembangan diversifikasi pangan
- 7) Pembangunan irigasi baru

Kabupaten Kutai Barat

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	74,76	74,76–74,90	76,55–77,09
LPE (%)	7,57	7,57–8,35	8,72–8,78
Tingkat Kemiskinan (%)	9,56	8,50–9,56	5,42–6,14
Indeks Gini	0,266	0,250–0,266	0,233–0,235
TPT (%)	5,58	5,11–5,58	3,70–4,00

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Kubar :

- 1) Pembangunan tuntas jalan Tering-Ujoh Bilang
- 2) Pembangunan jalan Sotek-Bongan
- 3) Pembangunan Rumah Sakit Daerah Provinsi Tipe B*
- 4) Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan
- 5) Penyediaan afirmasi akses pendidikan
- 6) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 7) Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan
- 8) Pengembangan diversifikasi pangan
- 9) Pembangunan irigasi baru
- 10) Pengembangan angkutan Sungai

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (2)

Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	76,57	76,57–76,86	78,84–79,41
LPE (%)	5,62	5,62–5,70	7,60–7,71
Tingkat Kemiskinan (%)	7,28	6,10–7,28	3,35–3,50
Indeks Gini	0,307	0,290–0,307	0,270–0,272
TPT (%)	4,11	3,85–4,11	3,00–3,18

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Kukar :

- 1) Pembangunan sekolah menengah unggulan
- 2) Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
- 3) Penyediaan afirmasi akses pendidikan
- 4) Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting
- 5) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 6) Pengembangan ekonomi maritim
- 7) Pengembangan diversifikasi pangan
- 8) Pembangunan irigasi baru
- 9) Pengembangan angkutan Sungai
- 10) Revitalisasi dermaga Sungai Mahakam

Kabupaten Kutai Timur

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	75,90	75,90–76,18	77,75–78,29
LPE (%)	9,82	9,82–10,00	11,75–11,90
Tingkat Kemiskinan (%)	8,81	7,50–8,81	4,06–5,21
Indeks Gini	0,283	0,280–0,283	0,252–0,253
TPT (%)	5,76	5,44–5,76	4,30–4,50

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Kutim :

- 1) Pembangunan jembatan Nibung
- 2) Pembangunan jalan pendekat jembatan Nibung
- 3) Dukungan pengembangan KEK Maloy
- 4) Penyediaan afirmasi akses pendidikan
- 5) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 6) Pengembangan pelabuhan Maloy
- 7) Pengembangan destinasi wisata potensial
- 8) Pengembangan ekonomi maritim

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (3)

Kabupaten Berau

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	77,17	77,17–77,57	79,15–79,65
LPE (%)	7,28	7,28–7,30	9,60–9,75
Tingkat Kemiskinan (%)	5,08	4,00–5,08	2,50–2,75
Indeks Gini	0,317	0,312–0,317	0,277–0,282
TPT (%)	5,16	4,78–5,16	3,90–4,05

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Berau :

- 1) Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
- 2) Penyediaan afirmasi akses pendidikan
- 3) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 4) Pengembangan destinasi wisata potensial Derawan dan sekitarnya
- 5) Pengembangan ekonomi maritim
- 6) Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems*
- 7) Pembangunan irigasi baru

Kabupaten Penajam Paser Utara

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	74,94	74,94–75,00	76,93–77,46
LPE (%)	30,68	8,50–10,00	9,53–10,00
Tingkat Kemiskinan (%)	6,69	5,50–6,69	3,31–3,76
Indeks Gini	0,258	0,255–0,258	0,230–0,240
TPT (%)	2,05	2,00–2,05	1,40–1,52

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. PPU :

- 1) Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional
- 2) Dukungan pengembangan Kawasan Industri Buluminung
- 3) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 4) Pengembangan ekonomi maritim
- 5) Pengembangan pelabuhan laut
- 6) Pengembangan dan pembangunan bandara
- 7) Pengembangan diversifikasi pangan
- 8) Pembangunan irigasi baru

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (4)

Kabupaten Mahakam Ulu

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	70,79	70,79–71,07	72,06–72,35
LPE (%)	3,60	3,60–3,65	4,69–4,80
Tingkat Kemiskinan (%)	10,75	9,70–10,75	6,50–6,90
Indeks Gini	0,285	0,280–0,285	0,232–0,233
TPT (%)	2,51	2,18–2,51	1,40–1,50

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kab. Mahulu :

- 1) Pembangunan tuntas Jalan Tering-Ujoh Bilang
- 2) Pembangunan jalan Long Bagun – Long Boh
- 3) Pembangunan Bandara Ujoh Bilang
- 4) Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan
- 5) Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
- 6) Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah
- 7) Penyediaan afirmasi akses pendidikan
- 8) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 9) Pengembangan ekonomi maritim
- 10) Penyelesaian permasalahan *Outstanding Boundary Problems*
- 11) Pembangunan irigasi baru

Kota Balikpapan

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	82,62	82,62–83,09	84,53–84,98
LPE (%)	3,23	3,23–3,30	5,71–5,77
Tingkat Kemiskinan (%)	2,23	2,00–2,23	1,66–1,72
Indeks Gini	0,324	0,305–0,324	0,272–0,279
TPT (%)	6,22	6,03–6,22	5,00–5,20

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Balikpapan:

- 1) Pembangunan Dermaga Multipurpose Kariangau, Pelabuhan Balikpapan
- 2) Penanganan Simpang Muara Rapak
- 3) Pembangunan SPAM Regional Sistem Mahakam/Sistem Sepaku-Semai
- 4) Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo
- 5) Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau
- 6) Pembangunan dermaga multipurpose Kariangau
- 7) Pembangunan TPA Regional
- 8) Peningkatan Jalan Provinsi di Kota Balikpapan

INDIKASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (5)

Kota Samarinda

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	83,11	83,11–83,40	83,50–85,77
LPE (%)	8,66	8,66–8,70	10,20–10,40
Tingkat Kemiskinan (%)	4,30	4,00–4,30	2,45–2,60
Indeks Gini	0,330	0,312–0,330	0,278–0,284
TPT (%)	5,75	5,65–5,75	4,80–5,20

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Samarinda:

- 1) Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada dan Rumah Sakit Islam
- 2) Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RS Mata dan RSUD AMS II
- 3) Pembangunan Sekolah Menengah Unggulan*
- 4) Peningkatan Jalan Provinsi di Kota Samarinda
- 5) Pembangunan Jalan di Kota Samarinda
- 6) Rencana SAUM (Sarana Angkutan Umum Masal) Kota Samarinda
- 7) Pengendalian Banjir di Kota Samarinda
- 8) Revitalisasi dermaga Sungai Mahakam
- 9) Penyiapan pembangunan Tol Samarinda-Bontang

Kota Bontang

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	82,49	82,49–82,86	84,22–84,58
LPE (%)	-2,51	1,00–1,15	4,50–4,70
Tingkat Kemiskinan (%)	3,74	3,40–3,74	2,60–2,74
Indeks Gini	0,330	0,300–0,330	0,270–0,275
TPT (%)	7,06	6,73–7,06	5,31–5,35

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Bontang:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi
- 2) Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional
- 3) Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting
- 4) Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan
- 5) Pengembangan ekonomi maritim
- 6) Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi
- 7) Pembangunan SPAM Regional
- 8) Penyiapan pembangunan Tol Samarinda-Bontang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,17–6,40	6,40–7,20	7,20–8,30	8,30–8,50	8,50–8,60	8,60–8,75
2	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	212,18	212,18–221,55	221,55–232,10	232,10–246,65	246,65–263,58	263,58–282,92	282,92–305,14
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,90	3,92–3,95	3,95–3,97	3,97–3,99	3,99–4,00	4,00–4,01	4,01–4,05
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	18,26–18,28	18,28–18,46	18,46–18,74	18,74–19,27	19,27–20,03	20,03–21,04
5	Indonesia Blue Economy Index (indeks)	NA	27,04–32,92	32,92–38,81	38,81–44,69	44,69-50,58	50,58–56,46	56,46–62,35
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	5,05–5,78	4,70–5,20	4,20–4,70	3,70–4,20	3,37–3,70	3,06–3,37
7	Indeks Gini (indeks)	0,321	0,310–0,321	0,313–0,318	0,308–0,313	0,303–0,308	0,298–0,303	0,293–0,298
8	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,30*	3,35–3,40	3,40–3.45	3,45–3.49	3,49–3.53	3,53–3,57	3,57–3,62
9	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	61,74	61,7462,87	62,87–64,00	64,00–65,13	65,13–66,26	66,26–67,39	67,39–68,52
10	Indeks Modal Manusia (%)	0,56*	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63
11	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,59	38,59–40,82	55,05–60,70	60,70–60,80	60,80–65,90	65,90–67,46	67,46–72,63
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,63	76,63–80,20	80,20–80,52	80,52–80,83	80,83–81,15	81,15–81,46	81,46–81,78
13	Indek Reformasi Birokrasi	85,16	85,16–85,84	85,84–86,53	86,53–87,22	87,22–87,92	87,92–88,63	88,63–89,34
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,19	78,19–78,50	78,50–78,80	78,80–79,11	79,11–79,41	79,67–79,72	79,72–80,12
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14	4,60–5,14	4,54–5,07	4,50–4,82	4,30–4,77	4,14–4,75	3,95–4,68

Ket: *) Capaian tahun 2023

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (IKD)



RANCANGAN AWAL RKPD KALTIM TAHUN 2026



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH (1)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
I.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN			
1	Kontribusi PDRB Kaltim	Persen	3,90	3,95-3,97
2	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56*	0,59-0,60
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,87*	85,84-86,53
II.	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,17	6,40-7,20
5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,26	18,28-18,46
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	4,70-5,20
7	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,313-0,318
8	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	7,89	8,01-8,13
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	n/a	32,92-38,81
10	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	63,04*	68,66-71,89
11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,37	3,40-3.45
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,20-80,52
13	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	38,59	55,05-60,70
14	Indeks Risiko Bencana	Indeks	136,11	127,17-131,64
15	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,94	75,17-75,40

Ket: *) Capaian tahun 2023

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH (2)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi 2024	Target 2026
II.	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			
16	Prevalensi Stunting	Persen	22,90*	15,90-16,04
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	14,13-14,23
18	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,02	10,57-10,75
19	Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	12,80	14,50-15,19
20	PDRB Per Kapita	Juta Rp	212,18	221,55-232,10
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,54-5,07
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,19	78,50-78,80
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,56*	58,84-59,46
24	Nilai AKIP	Poin	78,74 (BB)	79,19-79,78 (BB)
25	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,74	62,87-64,00
26	Sistem Merit	Skor	271•	286-294
27	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,26	2,33-2,40
28	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72,75	75,84-76,81
29	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,75	4,06-4,09
30	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,79	3,85-3,91

Ket: *) Capaian tahun 2023

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN RKPD 2026 (1)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2026
KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES			
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,90	3,95–3,97
Sasaran 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	6,40–7,20
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,26	18,28–18,46
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,78	4,70–5,20
	Indeks Gini (indeks)	0,321	0,313–0,318
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (indeks)	7,89	8,01–8,13
Sasaran 4. Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia Blue Economy Index (indeks)	NA	32,92–38,81
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	63,04*	68,66–71,89
	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,30*	3,40–3.45
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	76,63	80,20–80,52
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,59	55,05–60,70
	Indeks Risiko Bencana (indeks)	136,11	127,17–131,64
KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS			
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56*	0,60
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,94	75,17–75,40
	Prevalensi Stunting (%)	16,17	15,90–16,04

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN RKPD 2026 (2)

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2026
Sasaran 6 : Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,03	14,13–14,23
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,02	10,57–10,75
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,11*	14,50–15,19
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita (Juta Rp)	212,18	221,55–232,10
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	4,54–5,07
Sasaran 8 : Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,19	78,50–78,80
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,56*	58,84–59,46
KONDISI PEMUNGKIN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK			
Tujuan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	85,16	85,84–86,53
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP (nilai)	78,74	79,19–79,78
	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	61,74	62,87–64,00
	Sistem Merit (skor)	271*	286–294
	Indeks Pengelolaan Aset (indeks)	2,26	2,33–2,40
Sasaran 10 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional (indeks)	72,75	75,84–76,81
Sasaran 11 : Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,00*	4,06–4,09
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,79	3,85–3,91

INDIKASI MAJOR PROJECT RKPD 2026

JP-1 Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan & perluasan areal tanam berbasis pertanian modern

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	9 Kabupaten/Kota (kecuali Mahulu)
2.	Pembangunan unit penetasan (<i>hatchery</i>) ayam lokal unggul	PPU
3.	Revitaliasai Penggilingan dan Pengeringan Padi	KUKAR, Paser, PPU, KUTIM, Berau, Samarinda, Mahulu, Kubar
4.	Pembangunan Lab. Kesmavet	Samarinda
5.	Pembangunan <i>Check Point</i> Hewan	Muara Komam – Paser
6.	Pembangunan RPB Komoditi Coklat	Berau

JP-2 Pengembangan teknologi & inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri & layanan publik

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Pembangunan Pusat Distribusi Pangan	Kariangau - Balikpapan
2.	Pembangunan Pabrik Es dan Cold Storage	PPI Sambaliung (Berau) dan PPI Manggar (Balikpapan)
3.	Pengembangan Aplikasi SAKTI (Satu Aplikasi Kalimantan Timur)	Provinsi Kaltim

JP-3 Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Peningkatan insentif guru untuk KB, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs	10 Kabupaten/Kota
2.	Peningkatan insentif ustadz/ustadzah	10 Kabupaten/Kota
3.	Peningkatan Insentif Penjaga Rumah Ibadah	10 Kabupaten/Kota

INDIKASI MAJOR PROJECT RKPD 2026

JP-4 Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Pengembangan Koperasi Digital dan Modern	10 Kabupaten/Kota
2.	Sertifikasi dan Pendampingan HKI untuk Produk Ekonomi Kreatif	10 Kabupaten/Kota

JP-5 Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Pengembangan Pariwisata di Geopark Sangkulirang Mangkalihat	Kutai Timur
2.	Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya	Provinsi Kalimantan Timur

JP-6 Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Pembangunan Workshop Las Bawah Air BLKI Bontang	Bontang
2.	Pembangunan RSJD Atmahasada	Samarinda
3.	Pembangunan RS Islam	Samarinda
4.	Pengembangan SMA Negeri 3 Tenggarong	KUKAR

INDIKASI MAJOR PROJECT RKPD 2026

JP-7 Pembangunan infrastruktur di seluruh kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan Kewenangan Provinsi	10 Kabupaten/Kota (diluar KUBAR dan MAHULU)
2.	Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang	KUBAR dan MAHULU
3.	Pembangunan Jalan Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai	MAHULU
4.	Pembangunan SPAM Regional Sistem Mahakam	Samarinda
5.	Pembangunan Jalan Sei. Nibung – SP.46	KUTIM
6.	Pembangunan Bandara Ujoh Bilang	MAHULU
7.	Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan dengan Skema BPS <i>buy the service</i> Koridor Samarinda - Tenggarong	Samarinda dan KUKAR
8.	Pemasangan Jaringan Internet (FO) Desa dan Kelurahan	7 Kabupaten

JP-8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Revitalisasi Dermaga Sungai Melak	KUBAR

JP-9 Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemda, pusat, & swasta

NO	INDIKASI MAJOR PROJECT 2026	LOKUS
1.	Kerjasama Pemprov. Kaltim dan Pemkot Balikpapan dalam Pengelolaan Kawasan Industri Kariangau	Balikpapan

KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026

APBD TA. 2025

**PENERIMAAN DAERAH
RP 21,00 TRILIUN**

**PENDAPATAN DAERAH
Rp20,10 Triliun**

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp10,04 Triliun

PENDAPATAN TRANSFER
Rp9,86 Triliun

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Rp202,05 Miliar

**PENERIMAAN PEMBIAYAAN
(SiLPA)
Rp900 Miliar**

RANWAL RKPD 2026

**PENERIMAAN DAERAH
RP 18,78 TRILIUN**

**PENDAPATAN DAERAH
Rp18,78 Triliun**

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Rp8,07 Triliun

PENDAPATAN TRANSFER
Rp8,43 Triliun

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Rp1,22 Triliun

**PENERIMAAN PEMBIAYAAN
(SiLPA)
-**

ASUMSI :

1. Penurunan PAD akibat penurunan penerimaan pajak daerah 18% akibat pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB (pemberlakukan UU HKPD dan Perda 1/2024)
2. Penurunan Pendapatan Transfer akibat penurunan DBH sebesar 21% terutama pada DBH SDA Minerba dan DAK Fisik
3. Peningkatan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah akibat penambahan komponen penerimaan Bagi Hasil Pemegang IUPK Pertambangan Minerba

PENURUNAN TARGET INDIKATOR MAKRO KAB/KOTA 2026

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Indikator Makro	Indikasi Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	71,07–71,21
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,65–4,00
Tingkat Kemiskinan (%)	8,67–9,70
Indeks Gini	0,275–0,280
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,90–2,18

KABUPATEN BERAU

Indikator Makro	Indikasi Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	77,57–77,92
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,30–8,30
Tingkat Kemiskinan (%)	3,78–4,00
Indeks Gini	0,305–0,312
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50–4,78

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Indikator Makro	Indikasi Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	76,18–76,21
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,00–10,50
Tingkat Kemiskinan (%)	7,12–7,50
Indeks Gini	0,275–0,280
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,10–5,44

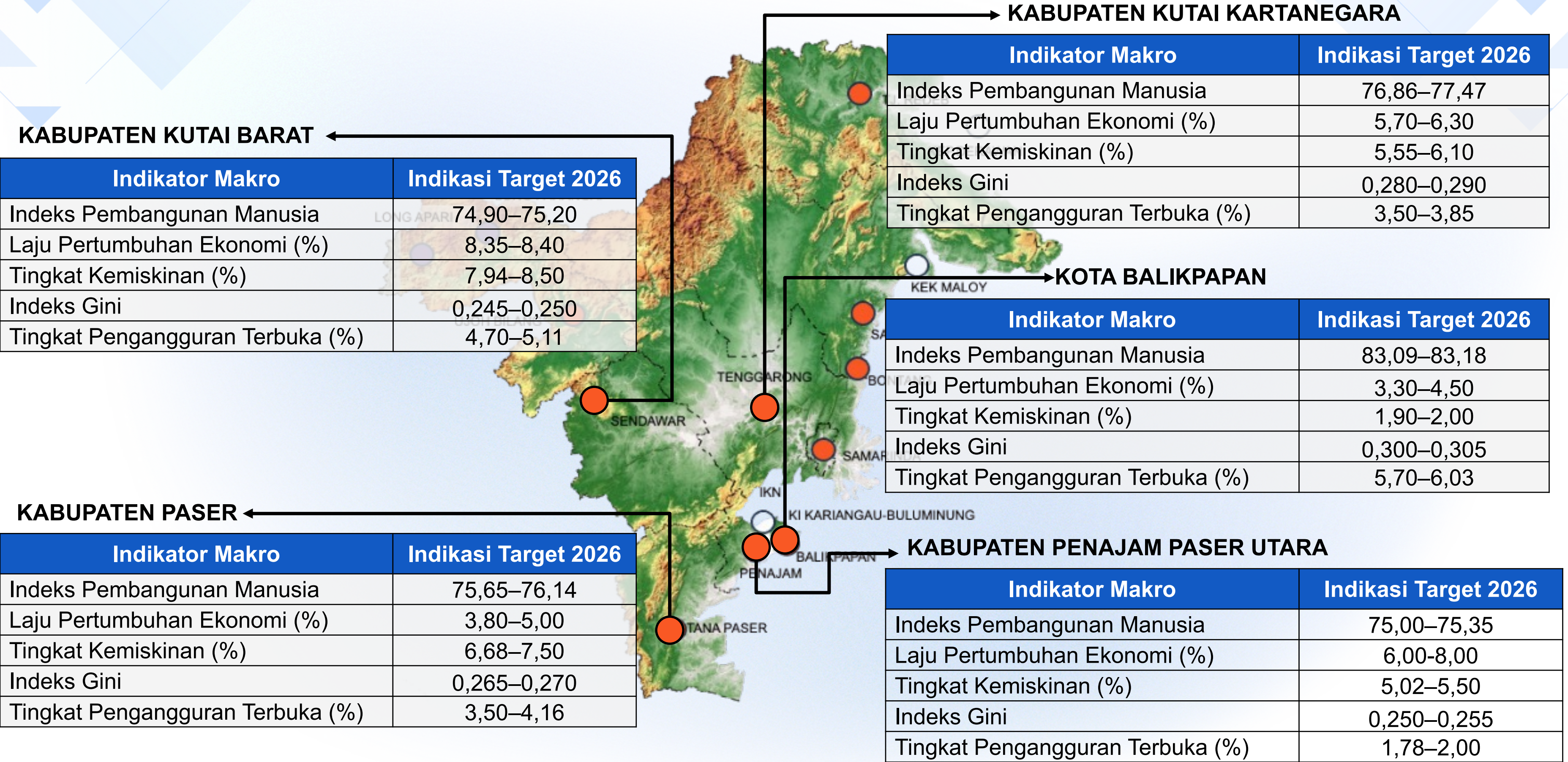
KOTA SAMARINDA

Indikator Makro	Indikasi Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	83,40–83,97
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,70–9,50
Tingkat Kemiskinan (%)	3,80–4,00
Indeks Gini	0,308–0,312
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,40–5,65

KOTA BONTANG

Indikator Makro	Indikasi Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	82,86–83,18
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,15–2,50
Tingkat Kemiskinan (%)	3,15–3,40
Indeks Gini	0,290–0,300
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,05–6,73

PENURUNAN TARGET INDIKATOR MAKRO KAB/KOTA 2026



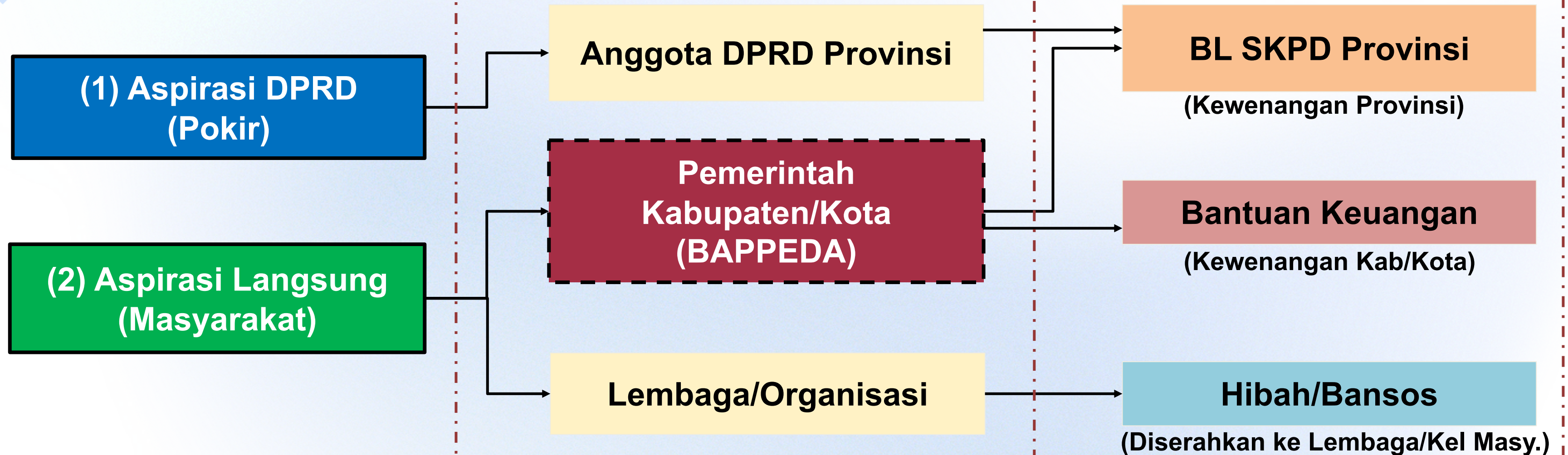
PENYAMPAIAN USULAN ASPIRASI

Menu Usulan

Penginput Usulan

Klasifikasi Jenis Usulan

Penyampaian Usulan Aspirasi SIPD-RI Rencana dibuka tanggal 20 Maret s.d. 23 April 2025



Regulasi yang perlu diperhatikan :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. BL RENJA | → KEPMEN 3406/2024 |
| 2. BANKEU | → PERGUB 21/2024 |
| 3. HIBAH/BANSOS | → PERGUB 23/2021 |

KAMUS USULAN RKPD 2026 (1)

Belanja Langsung PD	Bantuan Keuangan Kab/Kota	Hibah/Bansos	Total
73 kamus usulan	43 kamus usulan	10 kamus usulan	122 kamus usulan

No	Kamus Usulan Belanja Langsung PD RKPD Kaltim Tahun 2026
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
2	Peningkatan Jalan dan Jembatan di Ruas Jalan Provinsi
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Perbatasan (Tering – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai)
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
5	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Permukaan dan Rawa
6	Pembangunan Perkuatan Tebing di Wilayah Sungai
7	Normalisasi Sungai
8	Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai (Abrasi)
9	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
10	Peningkatan Kualitas Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
11	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman*
12	Bantuan Bibit Buah/Multipurpose Tree Species dalam rangka Penghijauan Lingkungan
13	Bantuan Peralatan Ekonomi Produktif Kelompok Perhutanan Sosial
14	Bantuan Peralatan Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)
15	Penyediaan Benih, Pupuk, Pestisida (Benih, Pupuk, Herbisida, kapur), Alsintan, (Sesuai PP No. 81/2001 dan Permentan No. 21 Tahun 2023) dan Sarana Pendukung Perkebunan

No	Kamus Usulan Belanja Langsung PD RKPD Kaltim Tahun 2026
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (Pasca panen dan pengolahan)
17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (Budidaya Komoditi Perkebunan)
18	Ekspose/Promosi Komoditas Perkebunan
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Brigade dalam rangka Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan (Dalkarlabun)
20	Peningkatan kapasitas Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Brigade dalam rangka Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan (Dalkarlabun)
21	Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditi Perkebunan (Mangkok sadap, pisau sadap, talang sadap, pembeku latex, solar dryer portabel, mesin perontok lada, pemecah kulit ceri kopi, kotak fermentasi kakao, ring mangkok sadap, gerobak dorong, alat press karet)
22	Penyediaan Sarana Pengolahan Perkebunan (Mesin Parut Kelapa, Wajan, Mesin Pemeras Santan, Timbangan, Cetakan Gula Aren, Pengaduk Gula Aren, Pengiling Bubuk Lada, kompor dan tabung gas untuk pembuatan minyak goreng kelapa, induction sealer machine F500/mesin induksi segel botol aluminium foil)

KAMUS USULAN RKPD 2026 (2)

No	Kamus Usulan Belanja Langsung PD RKPD Kaltim Tahun 2026
23	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)
25	Pengadaan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
26	Peningkatan Kapasitas Peternak
27	Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan (mesin pengering gabah, color sorter (mesin penyortir beras), power thresher (alat pemisah gabah dan beras), mesin pemipil jagung, Combine Harvester)
28	Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditi Hortikultura (Bangsal Pasca Panen, Cable Way)
29	Penyediaan Benih, Pupuk dan Pestisida ((Benih Padi, Benih Jagung, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair, Herbisida, Kapur), Alsintan (Sesuai PP No. 81/2001 dan Permentan No. 21 Tahun 2023) serta Sarana Pendukung Sub Sektor Tanaman Pangan
30	Penyediaan Benih, Pupuk dan Pestisida (Benih Pisang, Benih Bawang Merah, Benih Cabe, Benih Pepaya, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair, Herbisida, Kapur) dan Alsintan (Sesuai PP No. 81/2001 dan Permentan No. 21 Tahun 2023) serta Sarana Pendukung Sub Sektor Tanaman Hortikultura
31	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian (Petani/Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura)
32	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (Tanaman Pangan dan Hortikultura)
33	Perluasan Jaringan Listrik PLN

No	Kamus Usulan Belanja Langsung PD RKPD Kaltim Tahun 2026
34	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit Rumput Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring rumput laut) di Paser, PPU, Balikpapan, Kukar, Kutim, Bontang dan Berau
35	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di, Berau, Balikpapan, Kutim, Kukar, Bontang, Paser, dan PPU dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Samarinda, Balikpapan, Paser, PPU, Kutim, Berau, serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau (Jempang, Semayang, Melintang), Kukar, Kubar, Mahulu.
36	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, Mesin Ketinting Ukuran 13-18 PK, Alat Penangkapan Ikan, CoolBox Ikan Kapasitas ±200 Liter, Alat Bantu penangkapan ikan (GPS & Fish Finder), Kapal Fiber kurang dari 5 GT untuk perairan laut dengan spesifikasi teknis)
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Destinasi Wisata (toilet, swafoto, jalur tracking, gerbang, dermaga, sarana homestay, gazebo, pusat kuliner, perahu wisata) di Lokasi Prioritas KSPP dan KPPP
38	Penguatan dan Pembinaan Digitalisasi UKM
39	Penguatan dan pembinaan UKM Ekspor dan UKM Potensial Ekspor
40	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA
41	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK
42	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SLB

KAMUS USULAN RKPD 2026 (3)

No	Kamus Usulan Belanja Langsung PD RKPD Kaltim Tahun 2026
43	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA
44	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMK
45	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SLB
46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMA
47	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMK
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SLB
49	Pengadaan Mebel SMA
50	Pengadaan Mebel SMK
51	Pengadaan Mebel SLB
52	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
53	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
54	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB
55	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA
56	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK
57	Rehabilitasi Ruang Kelas SLB
58	Pengembangan Fasilitas Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan (Fasilitas Laboratorium Medik, Laboratorium Lingkungan, dan Laboratorium Kalibrasi)
59	Peningkatan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Ambulance/Mobil Jenazah, Peningkatan Rumah Sakit Kelas D ke C)
60	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Fakir Miskin (Bahan/barang Jualan Makanan, Minuman, Gorengan, Pembuatan Kue, Budidaya Ikan, dan Ternak Ayam)

No	Kamus Usulan Belanja Langsung PD RKPD Kaltim Tahun 2026
61	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pencari Kerja Secara Berkelanjutan
62	Pemenuhan sarana dan prasarana pada workshop Pelatihan pada BLKI Kewenangan Provinsi Berbasis Kompetensi agar sesuai standar
63	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Perempuan Kepala Keluarga (Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan melalui Peningkatan Peran Aktif, Pengembangan SDM & Ekonomi Kreatif bagi Perempuan)
64	Pelatihan kepada Pelaku BUMDesa
65	Pelatihan Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa
66	Penyediaan Sarana dan Prasana BUMDesa
67	Rehabilitasi Bendung/Waduk
68	Pengadaan Infrastruktur Digital, Pelatihan Literasi Digital, dan Penyediaan Jaringan Internet
69	Bantuan Pelatihan Relawan Bencana (Bencana Alam, Bencana Kebakaran, dst)
70	Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
71	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah*
72	Pengadaan Kapal <i>Rescue</i> (Kapal Reaksi Cepat Bantuan Bencana)*
73	Penyediaan alat Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi ASN*

KAMUS USULAN RKPD 2026 (4)

No	Kamus Usulan Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota RKPD Kaltim Tahun 2026
1	Peningkatan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	Penyediaan Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Benih Jagung, Benih Hortikultura, Pupuk NPK, Herbisida, Kapur, Traktor Roda 2 untuk komoditi Tanaman Pangan, Rotavator, Hand Sprayer, Cultivator (Alat Pengolah Tanah Lahan Kering), Traktor Roda 4 untuk Komoditi Hortikultura, Mesin Pompa Air, Sprinkle)
3	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
4	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Benih Ikan Air Tawar, Pakan, Jaring Keramba, Saponin, Pupuk, Mesin Pakan dan Cool Box)
5	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan
6	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
7	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Permukaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
8	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Permukaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
9	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
10	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
11	Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
12	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

No	Kamus Usulan Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota RKPD Kaltim Tahun 2026
13	Peningkatan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota
14	Peningkatan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota
15	Penyediaan PSU untuk Menunjangi Fungsi Perumahan
16	Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SD/SMP
17	Peningkatan Jalan Usaha Tani
18	Pembangunan Green House untuk Komoditi Hortikultura
19	Penyediaan Pupuk, Pestisida, dan Sarana Pendukung Perkebunan (Benih, Pupuk, Pestisida, kapur, hand sprayer)
20	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
21	Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Wisata yang dikelola oleh pemerintah (Pusat Informasi Pariwisata, Gazebo, Pendopo Wisata, Rumah toilet standar internasional, Pusat kuliner, jembatan wisata, jalan tapak di kawasan wisata, dermaga, view point, tower/menara pandang, perahu wisata)
22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat
23	Penyediaan Prasarana Air Bersih skala komunal
24	Pembangunan Prasarana pengolahan hasil perkebunan (Rumah Pengolahan Aren, Rumah Pengolahan Karet)
25	Pembangunan Prasarana peternakan (kandang ternak, Gudang Pakan, Gudang Pupuk)
26	Penyediaan sarana perikanan tangkap perairan umum daratan (perahu, mesin ketinting 7-14 PK, coolbox, alat tangkap ramah lingkungan)

KAMUS USULAN RKPD 2026 (5)

No	Kamus Usulan Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota RKPD Kaltim Tahun 2026
27	Pemenuhan sarana dan prasarana pada workshop Pelatihan pada BLK Kabupaten Kutai Timur dan BLK Kabupaten Paser Berbasis Kompetensi agar sesuai standar
28	Sarana Prasarana Olah Raga Untuk Mendukung Kegiatan Porprov 2026
29	Penyediaan Pintu Air Irigasi Persawahan
30	Pembangunan Puskesmas Kawasan Perbatasan
31	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
33	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
34	Fasilitasi Penyediaan Sarana Pengadaan Dokumen Kependudukan (Alat Rekam KTP Elektronik)
35	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
37	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
38	Bantuan Rumah Singgah Kewenangan Kab/Kota
39	Pembangunan embung untuk air baku
40	Pembangunan Embung pertanian untuk sawah
41	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota
42	Penanganan Stunting (Bankeu Spesifik)
43	Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik)

No	Kamus Usulan Belanja Hibah/Bansos RKPD Kaltim Tahun 2026
1	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial
2	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan
3	Hibah sarana peribadatan
4	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Negeri
5	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Swasta
6	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan
7	Hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah
8	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB Swasta
9	Hibah Kepada SD/SMP Swasta
10	Hibah Kepada PAUD/TK Swasta

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (1)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	78,61	79,69–80,47
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	7,40	6,76–7,08
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,679	1,388
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	83,71	84,76–85,81
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	76,63	80.52
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	4,88	9,14–13,88
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,59	18,75-22,50
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	60,9	69,00-70,55
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	49,19	50,29-55,05
10	Indeks Risiko Bencana	poin	136,11	127,17–131,64
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,55–0,62
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,93	2,15–2,54
13	Rasio Penduduk	%	107,27	106,46
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	32,00	35,98
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,17	6,40–7,20
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	4,70–5,20
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	212,18	221,55–232,10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,14	4,54–5,07
5	Indeks Gini	angka	0,321	0,313–0,318
6	Indeks Modal Manusia	angka	0,56*	0,60
7	Umur Harapan Hidup	tahun	74,94	75,17–75,40
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,286*	0,318–0,336
9	Prevalensi Stunting	%	22,90*	18,73–19,80
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,02	10,57–10,75
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,03	14,13–14,23
12	Angka Literasi/Numerasi	%		
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78,34	81,95–85,56
14	Indeks Literasi Digital	angka	3,62*	3,79–3,85
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	45,32*	70,04–71,74

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (2)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	78,19	78,50–78,80
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	57,56*	58,84–59,46
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	64,04*	68,15–70,20
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	79,48*	72,0
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,414*	0,375–0,392
21	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	59,17*	63,09–63,73
22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,11*	14,50–15,19
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan	%	41,16	39,57
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,26	18,46
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,12	1,35–1,58
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,61*	
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,04*	3,37–3,61
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,07	
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	61,74	62,87–64,00
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/Jiwa	63,04*	68,66–71,89
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	29,07*	32,92–38,81
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12,14	15,73
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	6,66*	6,70–6,78
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35,72	
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	40,44	
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	7,89	8,01–8,13
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,77	80,64–81,85
16	Persentase Desa Mandiri	%	31,15	23,78%
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,00	1,36–1,42
18	Tingkat Inflasi	%	1,47	1,5-2,0

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (3)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	indeks	97,08	97,0-97,5
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,79	3,85–3,91
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,75	4,06–4,09
4	Indeks Integritas Nasional	angka	72,75	75,84–76,81
5	Persentase Penegakan Perda	%	n/a	-
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64,3	65,00-68,00
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,28*	82,45
8	Indeks Rasa Aman	angka	n/a	62,00
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	n/a	52,22
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,30*	3,40–3.45
11	Nilai AKIP	Nilai	78,50	129,60
12	Sistem Merit	Skor	271*	79,19–79,78
13	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,26	286–294
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
A	PENDIDIKAN			
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)*	%	81,84	82,57
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)*	%	53,75	71,34
B	KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,72	1.8
2	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100
5	Angka kematian ibu (AKI)*	angka	84	60
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)*	%	22,9	18.43

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (4)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	74,19	94.43
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	%	77,35	97.65
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64,44	63.04
4	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir*	%	82,21	75
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob*	%	60,35	77.55
6	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas*	%	n/a	
7	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota*	%	n/a	
8	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)*	%	Layak : 84,23% Aman : 4,88%	
9	Tingkat kemantapan jalan*	%	78,72	87.58
10	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli*	%	45,00	55.02
11	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi*	%	n/a	
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*	%	n/a	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*	%	n/a	
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani*	%	84,84	60.58
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)*	%	n/a	
E	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*	%	100	100
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (5)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
E	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana*	%	100	100
6	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas*	%	n/a	100
7	Persentase penanganan pasca bencana*	%	n/a	100
F	SOSIAL			
1	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial*	%	n/a	
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesekjahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA*	%	n/a	
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar*	%	n/a	
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti*	%	100	100
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100
7	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100
8	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	n/a	
9	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar*	%	n/a	
10	Persentase penerima manfaatn yang meningkat kemandirian ekonomi*	%	n/a	
11	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana*	%	100	100
G	TENAGA KERJA			
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja*	%	80	90
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	94,75	50
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	29,10*	7:00

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (6)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
G	TENAGA KERJA			
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	69,20	20
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47,82	28:10:00
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	85,33	86
7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri*	%	n/a	
H	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	28,67	29,22
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0,54	1.98
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	22,88	23.11
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif*	%	n/a	100
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif*	%	n/a	100
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*	indeks	79,71*	
I	PANGAN			
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan/ Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	372,73	96.61
2	Skor pola pangan harapan*	skor	89,10	90.39
3	Persentase daerah rentan rawan pangan*	%	0	0
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan*	%	78,20	87
J	PERTANAHAN			
1	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu*	%	n/a	
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat*	%	n/a	

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (7)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
J	PERTANAHAN			
3	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum tanah absentee*		n/a	
4	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah*	%	n/a	
5	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah*		n/a	
K	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	76,63	80.52
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	%	96,91	98
3	Indeks kinerja pengelolaan sampah*	indeks	49,34	54
L	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	45	55
3	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital*	%	6	20
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak*	%	76	82,5
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
6	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
7	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
8	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
M	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	25
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	6,3	13,8
3	Persentase fasilitasi penataan desa*	%	n/a	3
4	Persentase fasilitasi kerjasama desa*	%	n/a	10
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)*	%	n/a	19,38
6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat*	%	n/a	20,1

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (8)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
N	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)*	%	2,17	2,12
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility)*	%	18,2	17,2
3	Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)*	%	57,1	57.25
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)*	%	15,80	14,24
O	PERHUBUNGAN			
1	Rasio konektivitas provinsi	Poin	0,846	0.882
2	Konektivitas Darat*	Rasio	0,44	0.48
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal*	%	n/a	
4	Konektivitas Laut*		n/a	
P	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	84,33	
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)*	%	n/a	
Q	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	17	60
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	100	75
3	Pertumbuhan volume usaha koperasi*	%	n/a	
4	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal*	%	n/a	
5	Pertumbuhan wirausaha*	%	n/a	
6	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor*	%	n/a	
R	PENANAMAN MODAL			
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	24,46*	
2	Realisasi total terhadap target investasi*		n/a	

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (9)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
S	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,37	1.45
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,49	34.97
3	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	232	135
T	STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
3	Indeks Pembangunan Statistik*	indeks	2,68	2.75
U	PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66,51	70
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah*	%	67	80
V	KEBUDAYAAN			
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	50	60
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	35,8	40,5
3	Persentase Cagar budaya yang Dilestarikan	%	27,7	28,8
W	PERPUSTAKAAN			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat*	skor	69,53	71,5
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78,34	70,5
X	KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74,88	78
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	36,66	45

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (10)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
Y	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap*	Ton	190.000	200.000
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	105.72	100
3	Jumlah produksi perikanan budidaya*	ton	200.000	202.000
4	Luas kawasan konservasi*			328.247,25
5	Angka konsumsi ikan*	Kg/kapita/tahun	58,51*	36,75
Z	PARIWISATA			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	23,02	12,1
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	-28,32	64,5
3	Tingkat hunian akomodasi	%	26,73	28,67
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,15	1,20
5	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual*	%	n/a	19,29
AA	PERTANIAN			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,70	4,10
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	370,3	-3.64
3	Peningkatan produksi tanaman pangan*	%	n/a	
4	Peningkatan produksi hortikultura*	%	n/a	
5	Peningkatan produksi komoditas peternakan*	%	n/a	
BB	KEHUTANAN			
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	163,64	78.78
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,16	< 1
3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	2,07	2.24
CC	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	80,56	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (11)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
DD	PERDAGANGAN			
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-18,52	54
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen*	%	100	100
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	75
4	Tertib Usaha	%	100	100
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	69	92,00,
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	100	80
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,06	1.15
8	Nilai ekspor barang*			
EE	PERINDUSTRIAN			
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	11,61	15
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	116,78*	120
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	26
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri*	%	n/a	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini*	%	95	95
FF	PENGADAAN			
1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	43,56	3.7
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	73,42*	75
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	143,07*	40
4	Tingkat kematangan UKPBJ*		Level 3	Level 3
GG	SEKRETARIAT DPRD			
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n*		n/a	100
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n*	%	n/a	70
HH	KEUANGAN			
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5,09	9.69
2	Rasio PAD	%	46,32	1.18

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUN 2026 (12)

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
HH	KEUANGAN			
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	15,36	64.8
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,02	1
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	3,64	3.1
7	Assets Management	Aspek	4	4
8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,73	5
9	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD*	%	n/a	
10	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik*	%	n/a	
11	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar*	%	n/a	
12	Persentase penurunan SILPA*	%	n/a	
13	Persentase penambahan nilai aset tetap*	%	n/a	
14	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah*	%	46,32	51.94
II	KEPEGAWAIAN			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65,94	68
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,63	35
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	84	86
JJ	PENGAWASAN			
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1*	%	72	90
2	Maturitas Penyeleggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	Level	Level 3	Level 3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*	Level	Level 3	Level 3
KK	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan*	%	n/a	
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan*	%	n/a	

Ket : 1) IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK | 2) IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK | 3) Angka bertanda * adalah data tahun 2023.



**SEKIAN DAN
TERIMA KASIH**